



# Swantara

Majalah Triwulan Lemhanna RI No. 24 Tahun VII / Maret 2018

# Skenario menuju satu abad Indonesia 2045



# ***SELAMAT Hari Raya. Nyepi***

***Tahun Baru Saka 1939***





**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO  
**PEMBINA** BAGUS PURUHITO  
**PENGARAH** ARIF WACHYUNADI  
**PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI** MINDARTO  
**REDAKTUR** WAHYU WIDJI PAMUNGKAS  
**PENYUNTING/EDITOR**  
EDDY TARJONO, LINDA PURNAMASARI  
**DESAIN GRAFIS**  
BAMBANG IMAN ARYANTO, ANDRIANSYAH  
**KOORDINATOR FOTOGRAFER** M. ISDAR  
**FOTOGRAFER** SURYADI, SUYONO  
**SEKRETARIAT** ADLANSYAH M, HERU SEPTOWIDODO,  
GATOT, MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI,  
JEMARI, YATIK WULANDARI  
**PENULIS ARTIKEL**  
ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI HILDAMONA,  
MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA, AISYAH SALSABILA  
  
**ALAMAT REDAKSI** BIRO HUMAS LEMHANNAS RI  
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110  
**TELP.** (021) 3832108, 3832109  
**FAX** (021)-3451926  
**EMAIL** : humas@lemhannas.go.id  
**WEBSITE** : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR  
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA  
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

# Catatan Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua  
Om Swasti Astu

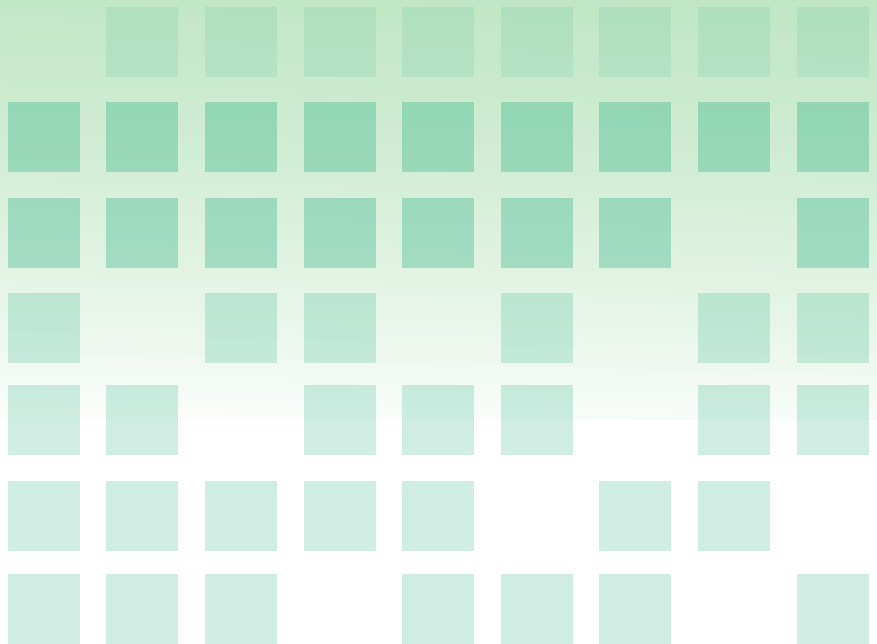
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya Majalah Swantara Edisi ke-24 bulan Maret 2018, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Pada edisi ke-24 ini, redaksi berusaha terus meningkatkan kualitas, baik konten maupun layout agar lebih segar dan mampu memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelembagaan dan memberikan pesan yang sarat makna kepada pembaca. Selain kegiatan kelembagaan, redaksi juga berkesempatan mewawancarai Prof. Dr. Njaju Jenny Malik untuk menggali lebih jauh mengenai forum diskusi Lemhannas RI sebagai upaya untuk merespon isu terkini.

Redaksi menyadari jika penyusunan penerbitan Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, kami tetap mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 24 kali ini.

Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera  
Om Shanti Shanti Shanti Om





# Salam Ketahanan Nasional

Lemhannas RI mengemban peran dan fungsi dalam membina dan mengembangkan ketahanan nasional melalui doktrin wawasan nusantara. Dalam perwujudannya, Lemhannas RI melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tuntutan tugas pokok dan fungsi yang diembannya yaitu menyelenggarakan program pendidikan pimpinan tingkat nasional, program pengkajian strategis, dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam menyikapi dinamika sosial dan politik Indonesia terkait penyelenggaraan Pilkada 2018, Lemhannas RI menyelenggarakan Forum Komunikasi antara Pemimpin Redaksi Media Massa dengan Pimpinan Lemhannas RI bertemakan Tantangan Ketahanan Nasional Menghadapi Pilkada 2018. Selain itu, Lemhannas RI telah mengundang Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dalam Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Entrepreneur Organization (EO) angkatan II. Yudi dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan Pancasila, untuk itu Indonesia tanpa Pancasila, bagaikan sapu lidi yang berserakan tanpa ikatan.

Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-kader pemimpin nasional, menghasilkan rekomendasi kajian-kajian isu strategis baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-24 yang diterbitkan pada Maret 2018 ini dapat menjadi insight bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan politik nasional.

Gubernur Lemhannas RI

## Daftar Isi

### SEPUTAR KITA



6 Indonesia perlu penyegaran mindsset maritim



8 Kembangkan Teknologi Pertahanan lewat pengadaan Alutsista yang tepat



20 Reorientasi kurikulum Dikti hadapi Revolusi Industri 4.0



22 Kisnu Haryo : Kesadaran membangun NKRI berawal dari pemahaman Wasbang dan Pancasila



36 Merit System untuk Profesionalisme ASN



38 Pengenalan konsep Ketahanan Nasional dan Astragatra pada Peserta PPRA LVII



46 Politik Uang, Isu SARA, dan Gagalnya Kaderisasi Parpol dalam Pilkada 2018 Jadi Topik Utama Dalam Forum Komunikasi antara Pemred dengan Pimpinan Lemhannas RI



48 Sambut Revolusi Industri 4.0, Indonesia Akan Ciptakan 1000 Technopreneurs



10 Bersinergi mencapai cita-cita Nasional



12 Lemhannas Koordinasi dengan komisi I DPR RI bahas hasil kajian



14 Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan



16 Skenario menuju Satu Abaad Indonesia 2045



18 Lemhannas perlu Pertahankan Kinerja



24 Gubernur Lemhannas RI bertolak ke Amerika serikat



28 Yudi Latief: Indonesia tanpa Pancasila, bagai sapu lidi yang berserakan tanpa ikatan



30 Redam Suhu Pilkada 2018 dengan Damai dan kasih Natal



32 Urgensi Rancangan Undang-undangan wawasan Nusantara



34 Pegawai Lemhannas mendapatkan Sosialisasi Aplikasi KRISNA



40 Peserta PPRA LVII diharapkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab



42 E-Learning Permudah Peserta PPRA Belajar Jarak Jauh



44 Lemhannas Libatkan Tokoh Pemuda, Masyarakat, dan Ormas Kawal Ketahanan Nasional

## SUARA ALUMNI

50 Amur Chandra JB Strategi Pemerintah melalui Peningkatan kerjasama Internasional



52 Prof. Dr. Njaju Jenny Malik, Ciptakan Intellectual Atmosphere lewat "Forum Berbagi Ilmu"

## WAWANCARA

# Indonesia Perlu Penyegaran Mindset Maritim

Tenaga Profesional Bidang Sistem Manajemen Nasional Laksda TNI (Purn) Untung Suropati menjadi salah satu pembicara dalam Konferensi Internasional, Conference on Indonesian Foreign Policy (CIPF) 2017 di The Kasablanka Mall, Jakarta, Sabtu (21/10).

**C**IPF merupakan festival diplomasi yang mempertemukan pejabat, duta besar, diplomat, politisi, selebriti, pengusaha, tokoh masyarakat, kalangan militer, intelijen, peneliti, pakar, jurnalis, pengamat, dosen, serta mahasiswa. Perhelatan internasional ini mengangkat tema besar 'Win-Wining ASEAN, Conquering Globalization' sebagai peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN pada tahun ini dan kaitannya dengan masalah globalisasi yang akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan dunia.

Terdiri dari 18 sesi dengan 80 orang pembicara dari dalam maupun luar negeri. Laksda TNI (Purn) Untung Suropati menjadi pembicara mengisi sesi forum yang membahas mengenai Konflik Laut Cina Selatan. Hadir pula sebagai pembicara Diplomat Senior Indonesia Prof. Hasjim Djalal, Asisten Profesor Hubungan Internasional dan Ilmu Politik di Universitas De La Salle Prof. Richard Heydarian, Peneliti Senior dan Direktur Pusat Analisis Kebijakan

di Akademi Diplomatik Vietnam Dr. Ha Anh Tuan, dan Thomas Benjamin Daniel selaku Analis di Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia.

Dalam paparannya, Untung Suropati menyampaikan pandangan bahwa Indonesia sudah seharusnya memainkan peran tradisionalnya sebagai penyeimbang strategis. Hal ini pada dasarnya merupakan inti dari basis kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sesuai dengan pidato Bung Hatta 'Mendayung di antara Dua Karang' di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) di Yogyakarta, 2 September 1948, mengenai sikap politik luar negeri Republik Indonesia, "Tidak boleh jadi pihak pasif dalam politik internasional, tetapi harus menjadi pelaku aktif yang berhak memutuskan pendiriannya sendiri," seperti ditulis oleh Rosihan Anwar, dalam Sejarah Kecil 'Petite Histoire' Indonesia Volume 2.

Menurut Untung Suropati dalam paparannya di depan seluruh peserta konferensi, yang harus dilakukan

dalam menghadapi konflik dan sengketa di Laut China Selatan, pertama, seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa adanya perkelahian atau kontak fisik, yakni dengan meraih kemenangan secara singkat tanpa perkelahian. Kedua, dengan mengenali musuh dan diri sendiri, maka seratus pertempuran pun tidak akan menjadi berbahaya. "Jika Anda mengabaikan musuh, tapi mengenal baik kemampuan diri maka menang atau kalah atau setara tidak masalah. Namun jika Anda mengabaikan keduanya maka dengan kata lain Anda sedang berperang dengan keduanya," jelas Untung Suropati.

## Poros Maritim Dunia: Doktrin Maritim yang Terlupakan

Seperti dalam tulisannya, yang pernah dimuat dalam jaman.or.id tentang mengembalikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Untung Suropati mengungkapkan bahwa tekad dan semangat menyatukan Nusantara menuju persatuan dan



“

*Poros Maritim Dunia adalah mega proyek nasional dengan rentang waktu lintas generasi. Strategi raya Poros Maritim Dunia terdiri dari tiga elemen utama, yaitu ends (objectives), ways (courses of action), dan means (resources).*

*-Taprof Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Untung Suropati*

tentu berbeda, namun kecenderungan strategi pilihannya sama yakni mawas keluar (*outward looking*).

Dalam kerangka berpikir seperti itulah konsep Poros Maritim Dunia harusnya dipahami. Sebagai negara dengan sebagian besar wilayahnya berupa lautan, sungguh tepat formulasi Poros Maritim Dunia ditopang lima pilar berbasis maritim, yaitu Budaya Maritim, Ekonomi Maritim, Konektivitas Maritim, Diplomasi Maritim, dan Keamanan Maritim.

Tak diragukan lagi, laut adalah elemen paling esensial untuk pembangunan Indonesia ke depan. Laut adalah masa depan, di sanalah tersimpan harapan. Saatnya *mindset* maritim Indonesia disegarkan kembali. Sejarah membuktikan, kunci kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sejatinya terletak pada kemampuan para elite kerajaan bercorak maritim tersebut mengelola ruang geografisnya berupa lautan.

Upaya menghidupkan kembali *mindset* maritim bangsa yang teralienasi pasca-keruntuhan Majapahit tahun 1478 sebenarnya telah dilakukan sejak zaman kemerdekaan. Contohnya pada era Presiden Soekarno dengan Wawasan Nusantara dan Deklarasi

Djoeanda, Presiden Soeharto dengan UNCLOS 1982, Presiden B.J. Habibie dengan Deklarasi Bunaken, Presiden Abdurrahman Wahid (DKP dan DEKIN), Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Hari Nusantara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Asas Kabotase, dan kini Presiden Joko Widodo dengan Poros Maritim Dunia. Langkah-langkah tersebut merupakan bukti setiap pemimpin sangat menyadari betapa pentingnya laut bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Untuk mewujudkan cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah akhirnya memang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Sebagaimana strategi pada umumnya, strategi raya Poros Maritim Dunia terdiri dari tiga elemen utama, yaitu *ends (objectives), ways (courses of action), dan means (resources)*, di mana *ends* merupakan totalitas *ways + means*. Poros Maritim Dunia adalah mega proyek nasional dengan rentang waktu lintas generasi. Oleh karena itu, komitmen, konsistensi, dan peran aktif seluruh komponen bangsa menjadi kunci utama keberhasilan membangun Poros Maritim Dunia. [AS]

kesatuan bangsa telah tumbuh dan berkembang sejak zaman Sriwijaya (671-1183) dan Majapahit (1293-1478). Perjuangan panjang dan melelahkan yang telah memakan waktu berabad-abad itu memperoleh momentumnya kembali setelah Presiden Joko Widodo pada sesi pidato pelantikannya sebagai Presiden RI ke-7 tanggal 20 Oktober 2014 dan forum KTT Asia Timur ke-9 di Myanmar tanggal 13 November 2014, menyatakan tekadnya ingin membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sebagai visi geopolitik sekaligus manifestasi tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea-4 Pembukaan UUD 1945, Poros Maritim Dunia pada dasarnya tidaklah berbeda dengan konsep serupa yang dikembangkan India/Look East, 1992; Jepang/ Confluence of the Two Seas, 2007; China/ 21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road, 2013; dan Amerika Serikat/ America First, 2017. Walaupun kepentingan nasional setiap negara

(Dua Dari kiri) Laksda TNI (Purn) Untung Suropati menjadi salah satu nara sumber dalam CIFP 2017





# Kembangkan Teknologi Pertahanan Lewat Pengadaan Alutsista yang Tepat

Sebuah negara bisa menjadi besar dan kuat salah satunya karena ditopang oleh industri strategis pertahanannya.

**S**eperti yang diungkapkan Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada saat berbicara dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Industri Pertahanan Part I, di Komisi Ekonomi dan Industri Nasional. "Tidak saja industri strategis pertahanan menjadi penting bagi pertahanan suatu bangsa, tetapi juga telah menjadi tonggak berdirinya kedaulatan suatu bangsa," ujar Agus Widjojo.

Ditilik dari perjalanan sejarahnya, perkembangan industri dan ekonomi membawa perubahan besar bagi negara-negara berkembang, dari aspek pembangunan industri strategis, ke arah negara industri baru. Seperti halnya di Taiwan, Korea, Afrika Selatan, Israel, dan Tiongkok, menurut Agus Widjojo Indonesia harus mampu mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah mengembangkan

teknologi pertahanannya menjadi aset strategis nasional. Hal tersebut dapat dicapai melalui investasi dan pemilihan strategi pengadaan alutsista yang tepat.

Namun dalam mengembangkan teknologi pertahanannya bukan tanpa hambatan, di antaranya bagaimana menjaga keunggulan teknologi dan otonomi kemampuan pertahanan lewat upaya penelitian dan pengembangan, kemudian bagaimana mengembangkan teknologi aplikasi, baik militer maupun sipil, yang dapat menarik industri sipil untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertahanan nasional. Pembangunan teknologi pertahanan memerlukan proses panjang dan mahal untuk memproduksi sistem senjata yang memenuhi kualitas dan kuantitas.

Menurut pria lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ini, aspek lain yang

perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan teknologi pertahanan adalah doktrin pertempuran yang menjadi rujukan TNI, yakni menyamakan standar alutsista di antara ketiga matra TNI. "Apabila TNI menggunakan doktrin operasi gabungan akan mempunyai konsekuensi standardisasi Alutsista atau *interoperability* antara TNI AD, AL, dan AU," ujar Agus Widjojo.

Secara umum, teknologi pertahanan membantu memperbaiki kemampuan industri dalam negeri dengan mengembangkan pembangunan ekonomi, mengamankan keamanan nasional, dan berperan sebagai elemen posisi tawar secara politik dan diplomatik dalam hubungan internasional.

Sejalan dengan berkembangnya kemampuan penelitian dari negara-negara industri baru dan berkembang ini, terjadi pergeseran pengadaan





alutsista yang semula import menjadi pembangunan yang bersifat lebih mandiri. Namun tekanan persaingan dalam pasar senjata internasional tak dapat dipungkiri hingga pada akhirnya membawa negara-negara ini kembali kepada pilihan kebijakan pengadaan senjata impor. Menurut Agus Widjojo, hal tersebut dikarenakan negara industri baru tidak memiliki pasar untuk menampung hasil ekspornya, serta produksi dalam skala kecil membutuhkan biaya yang tinggi sehingga tidak ekonomis. "Kebijakan pengadaan sistem senjata pada akhirnya tidak kuasa menolak pilihan pengadaan senjata impor, manakala pilihan ini menawarkan harga yang lebih ekonomis," ujar Agus Widjojo.

Peralatan militer yang bersifat khusus dan rahasia menjadi pembatas bagi sipil untuk ikut berpartisipasi dalam proses produksi persenjataan. Begitu pula sebaliknya, masih terdapat keengganan untuk melibatkan militer dalam institusi sipil. Kedua hal ini mengakibatkan industri sipil dan militer berkembang mengambil arahnya sendiri-sendiri tanpa integrasi. [AS]

“

*Teknologi pertahanan membantu memperbaiki kemampuan industri dalam negeri dengan mengembangkan pembangunan ekonomi, mengamankan keamanan nasional, dan berperan sebagai elemen posisi tawar secara politik dan diplomatik dalam hubungan internasional.*

*- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*



Gubernur Lemhannas RI menerima audiensi dengan UKP-PIP, TVRI, dan UNS di Ruang Tamu Gubernur

# Bersinergi Mencapai Tujuan dan Cita-Cita Nasional

Sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional, Lemhannas RI bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI).

**K**erja sama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dengan Ketua UKP-PIP Yudi Latief, Ph.D, Rektor UNS Surakarta Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. dan Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya, MBA, Ak., CPMA, CA di Ruang Nusantara Lemhannas RI pada Rabu (20/12).

Kerja sama yang akan dilakukan adalah terkait dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk seluruh komponen bangsa. Lebih jelasnya, kerja sama direncanakan meliputi penyusunan kurikulum dan materi bahan ajar untuk pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

untuk seluruh masyarakat, dan tukar menukar informasi perihal pengukuran ketahanan nasional berikut publikasi dan sosialisasinya.

Menanggapi kerja sama yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional tersebut, Helmy Yahya mengungkapkan bahwa sebagai televisi publik yang harus netral, informatif, edukatif, dan independen, TVRI sangat mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan 29 stasiun yang tersebar di provinsi seluruh Indonesia dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 4800 orang, TVRI sedang melakukan beragam upaya agar menjadi TVRI yang mengikuti perkembangan zaman. Upaya yang akan dilakukan dari kerja sama ini adalah membuat program-program yang edukatif, informatif, netral dan independen. "Kami butuh kerja sama lebih lanjut dari semua pihak agar

TVRI kembali menjadi seperti masa lalu, di mana berjaya di mata pemirsanya Republik Indonesia," tegas Direktur Utama TVRI periode 2017-2022 ini.

Bagi UNS, Ravik Karsidi mengungkapkan bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan pelatihan kepemimpinan untuk pejabat dan dosen di lingkungan perguruan tinggi adalah sangat penting.

Mengingat pemilihan pemimpin di lingkungan perguruan tinggi tak jarang berdasarkan pada popularitas. "Berangkat dari pemikiran bahwa selama ini pemimpin di perguruan tinggi baik Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan itu terpilih karena popularitas," jelas Ravik.

Dengan demikian, sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mengikuti latihan kepemimpinan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelatihan untuk



pejabat perguruan tinggi tersebut dianggap penting. Selain itu, kerja sama dilakukan oleh UNS dalam hal penyelenggaraan Program Studi Ketahanan Nasional jenjang S2, yang saat ini sedang dalam proses perizinan. UNS juga akan melakukan riset ketahanan nasional. Sebagai tahap awal, riset yang akan dilakukan adalah ketahanan sosial budaya yang dilatarbelakangi oleh posisi bangsa di era globalisasi. "Sekarang posisi bangsa Indonesia di era globalisasi ini, rentan terhadap kemungkinan akan rusak dan hilangnya ketahanan sosial budaya Indonesia khususnya tentang Pancasila," ungkap Alumni PPSA XVI.

Senada dengan Helmy Yahya dan Ravik Karsidi, Ketua UKP-PIP Yudi Latief juga menilai sangat penting untuk merajut kerja sama dengan Lemhannas RI. "Jadi nanti bagaimana bahan-bahan wawasan ideologi Pancasila yang sudah disiapkan oleh UKP, barangkali akan sangat penting, utamanya untuk para

peserta pendidikan di Lemhannas yang notabene merupakan orang-orang yang strategis di dalam kepemimpinan di berbagai bidang," ujar Yudi. Peran perguruan tinggi, lanjut Yudi, juga penting tidak hanya dalam mengajarkan Pancasila, akan tetapi melakukan riset dan kajian yang memperkuat Pancasila dari aspek pengayaan-pengayaan dimensi teoretik.

Sebagai televisi publik, Ketua UKP-PIP menilai bahwa TVRI seharusnya menjadi garda depan dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. "Nanti mungkin banyak sekali inisiatif dan karya-karya yang kita upayakan dengan komunitas, dalam bentuk film dan talkshow yang bisa kita kerja samakan dengan TVRI, dengan pendekatan-pendekatan baru supaya Pancasila bisa menjadi menarik," jelas Yudi Latief.

Menanggapi pemikiran-pemikiran Dirut LPP TVRI, Rektor UNS, dan Ketua UKP-PIP, Agus Widjojo berharap

terbentuk sinergi dalam mewujudkan ketahanan nasional. "Melalui kerja sama ini diharapkan terbentuk sinergi antara Lemhannas RI dengan UKP-PIP, UNS Surakarta dan LPP TVRI dalam mewujudkan ketahanan nasional," kata Gubernur Lemhannas RI. Kerja sama ini, lanjut Agus Widjojo, diharapkan juga dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk sumber daya yang ada di UKP-PIP, UNS Surakarta serta LPP TVRI, sehingga dapat meningkatkan peran Lemhannas RI, UKP-PIP, LPP TVRI maupun perguruan tinggi secara bersinergi mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, para Deputi dan Pejabat Struktural Lemhannas RI. [FR]



Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Wagub dan Deputy Pendidikan pada saat RDP dengan Komisi I DPR RI

## Lemhannas Koordinasi dengan Komisi I DPR RI Bahas Hasil Kajian

Lemhannas RI dalam melaksanakan fungsi pengkajian isu-isu strategis, baru-baru ini melakukan kajian isu aktual persiapan menjelang pilkada serentak 2018. Hasil kajian tersebut menghasilkan tujuh kajian yang dipaparkan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Rabu, 17 Januari 2018.

**T**ujuh kajian yang dilakukan Lemhannas mendapat respon dari beberapa anggota DPR RI. Pandangan beberapa fraksi berpendapat bahwa Lemhannas RI seharusnya dapat mempublikasikan hasil-hasil kajiannya untuk masuk ke ranah publik, tentunya dengan memanfaatkan tugas dan fungsi *public relations* yang baik. "Jadi hasil pemikiran yang bagus harus masuk di ranah publik. Kajian Lemhannas yang sangat akurat, seberapa jauh bisa menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa," ujar Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi I Fraksi PDI-P. Senada dengan Andreas, Rudianto Tjen anggota Komisi I Fraksi PDI-P juga memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, kajian-kajian yang dilakukan di Lemhannas belum pernah dipublikasikan di sosial media hingga menjadi viral di kalangan warganet.

Agus Widjojo menanggapi hal tersebut menyampaikan bahwa fungsi kajian yang dimiliki Lemhannas bersifat reka analisis. "Persoalannya yang kami pertimbangkan di sini adalah kami lembaga pemerintah non kementerian

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi lembaga pengkajian di sini bukanlah pengkajian yang bersifat mendalam seperti mungkin LIPI atau CSIS, tetapi lebih bersifat reka analisis dari apa yang kami baca lebih bersifat sumber-sumber kedua," ujar Agus Widjojo. Gubernur menambahkan bahwa jika hasil kajian menjadi viral di masyarakat, dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi bahwa lembaga ini menjadi pengimbang pemerintah. "Bisa dibayangkan semakin tajam hasil kajian kami semakin besar risikonya bahwa ini akan mungkin berbeda dengan hasil kajian pemerintah. Bayangkan jika pemerintah belum mendengar langsung dari Lemhannas dan ini sudah bergulir di publik, bagaimana posisi kami. Itu yang menjadi pertimbangan kami," kata Agus Widjojo.

Judul kajian Lemhannas yang juga sempat dibahas dalam RDP bersama Komisi I DPR RI yakni "Mengatasi *Proxy War* guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional". Roy Suryo, anggota Komisi I Fraksi Demokrat tertarik mengetahui lebih jauh terkait *proxy war* yang dimaksud dalam kajian tersebut. "Menurut



saya poin satu sampai enam lebih bersifat teori, sedangkan saya tertarik dengan poin ketujuh yang bersifat teknis atau bisa disebut action. Bagaimana detilnya, mengatasi *proxy war* guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional?" tanya Roy Suryo. "*Proxy war* pada hakekatnya adalah mencapai sebuah kepentingan bagi suatu pihak tanpa terlibat langsung dan kalau bisa dia menggunakan agen-agen dari kelompok yang sama yang menjadi sasaran tersebut. Jadi tidak terlihat ada pertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya," jawab Agus Widjojo.

Dalam kesempatan RDP tersebut dibahas pula beberapa agenda lainnya, di antaranya mengenai rencana program kerja tahun anggaran 2018, evaluasi program kerja, dan realisasi anggaran tahun 2017. Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Wagub

Marsdya TNI Bagus Puruhito beserta para deputy, direktur, dan kepala biro. Di akhir rapat, pimpinan Komisi I berharap agar ke depannya ikut dilibatkan dalam merundingkan hasil kajian isu strategis yang dilakukan Lemhannas RI, misalnya keterlibatan dalam pelaksanaan *focus group discussion* (FGD). "Kami akan sangat senang sekali jika ada diskusi langsung antara Lemhannas dengan anggota dewan yang sifatnya lebih informal dan tematis. Selalu mendapatkan hal-hal baru yang mestinya menjadikan kinerja kami semakin sempurna setiap kami mendapat undangan RDP dari Komisi I ini," ujar Agus Widjojo.



“

*“Proxy War pada hakekatnya adalah mencapai sebuah kepentingan suatu pihak tanpa terlibat langsung”*

*- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*



Laksda TNI Agung Pramono saat memberikan paparan terkait penyusunan program dan anggaran K/L

# Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan

Tahun 2018 menjadi babak baru bagi tiap-tiap kementerian/lembaga (K/L) dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang telah dirancang di tahun sebelumnya, tentunya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Program dan rencana kerja K/L serta Pemda sudah seharusnya mewakili visi dan misi Presiden. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Tajar Bidang Hankam Lemhannas RI, Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. pada saat memberikan paparan terkait Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan, di hadapan seluruh jajaran pimpinan tingkat eselon I hingga eselon III Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, Kamis (9/1). Agung Pramono menyebutkan bahwa visi dan misi jajaran pemerintahan secara hierarkis harus menunjukkan kesinambungan.

**K**/L dalam menyusun RKA-K/L menggunakan beberapa referensi, antara lain Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu, dan Penganggaran Berbasis Kinerja yang saat ini dikenal dengan reformasi birokrasi. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penyusunannya diantaranya indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja, tentunya dengan mempertimbangkan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Berbicara mengenai *output*, Agung Pramono mengingatkan perlunya tindak lanjut pemetaan lulusan Lemhannas RI. Para peserta lulusan Lemhannas perlu diteropong, setelah lulus jadi apa?" Agung Pramono menambahkan. Hal tersebut penting bagi Lemhannas RI untuk melihat tingkat kesuksesan pendidikan yang diselenggarakan Lemhannas RI.

Agung juga memaparkan terkait pengalokasian anggaran yang terbagi ke dalam dua kelompok, yakni angka dasar (*baseline*), dan inisiatif baru. "Sebagai contoh, jika setiap tahun Lemhannas dapat mendidik hingga 100 siswa, maka angka tersebut dapat menjadi *baseline*. Hal tersebut juga

berpengaruh terhadap anggaran, dimana berdasarkan baseline maka per tahun perlu ada kenaikan 7 sampai 10 persen," ujar Agung.

Mengenai kelompok anggaran inisiatif baru, Agung menjelaskan "Berarti ada kegiatan baru karena ada target baru sehingga ada anggaran baru. Ini yang disebut inisiatif. Program, *output*, *outcome* yang baru. Penambahan volume target, percepatan capaian," tambah Agung.

Untuk menghasilkan RKA yang berkualitas, dilakukan pengawasan secara berkala oleh Aparat Pengawas Internal (APIP). Di Lemhannas RI sendiri fungsi APIP berada pada Inspektorat. Pada saat Biro Perencanaan dan Keuangan (Renku) menyusun RKA, Inspektorat mulai melakukan proses penelitian atau *review* yakni dengan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan. "Mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, tidak akan putus diawasi oleh APIP. Menjamin keakurasian, ketepatan anggaran, ketepatan program, keandalan, keabsahan, sesuai standar biaya," ujar Agung.

Sedangkan penandaan anggaran atau *budget tagging* tematik yang dilakukan pada level output kegiatan oleh Eselon I, meliputi Anggaran Nawacita, Anggaran Prioritas, Anggaran Janji Presiden, dan Anggaran Tematik APBN. Jadi setiap Eselon I nantinya akan diminta untuk menyampaikan tabel rekap penandaan anggaran sebagai bahan penelaahan. Hasil akhir dari RKA-K/L dalam bentuk DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran berupa dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran (dalam hal ini Kementerian/Lembaga), tentunya sesuai dengan RKA-K/L yang telah disetujui oleh DPR RI dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan disarankan oleh Menteri Keuangan.

Setelah DIPA diserahkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan untuk segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. DIPA di sini berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja, dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN dan sebagai alat pengendali, pelaksanaan pelaporan, pengawasan APBN dan perangkat akuntansi pemerintah. [AS]



***“Untuk menghasilkan RKA yang berkualitas, dilakukan pengawasan secara berkala oleh Aparat Pengawas Internal (APIP), Menjamin keakurasian, ketepatan anggaran, ketepatan program, keandalan, keabsahan, sesuai standar biaya”***

*- Tajar Lemhannas RI Laksda TNI Agung Pramono*



**PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN K/L**





# Skenario Menuju Satu Abad Indonesia

# 2045

Gubernur Lemhannas RI menjadi narasumber dalam Workshop di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI

**D**inamika dan perkembangan politik dunia terus berkembang, hal tersebut tentu turut mempengaruhi dinamika politik Indonesia. Di tahun 2018 ini, Lemhannas RI akan mengangkat kembali Skenario Indonesia 2045 setelah sebelumnya Skenario Indonesia 2045 telah sukses diluncurkan pada tahun 2016.

"Revisi Skenario Indonesia 2045 diperlukan setiap 3-5 tahun sekali, dan 2018 adalah tahun yang tepat untuk melakukan pembaruan melihat makin beragamnya masalah yang dihadapi Indonesia dan perkembangan data di lapangan," kata Dr. Panutan Sulendrakusuma, Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI (28/2).

Pada waktu yang berbeda, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berkesempatan menyampaikan materi Skenario 2045, Menuju Satu Abad Indonesia di Ruang Seminar Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI (21/12/17). Proyeksi akan peluang dan hambatan

Indonesia pada satu abad mendatang sangat penting untuk dibahas pada saat ini sebagai langkah mewujudkan tujuan negara Indonesia sesuai pada pembukaan UUD 1945.

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa tantangan bangsa ke depan tidaklah mudah, terlebih harus menghadapi tatanan dunia baru dengan berbagai dinamika perubahan dalam lingkup nasional, regional maupun global yang nantinya akan mempengaruhi bangsa Indonesia. Tantangan lainnya yaitu pertumbuhan teknologi internet dan perkembangan sosial media yang masif, serta paham radikalisme dan aksi intoleransi yang saat ini marak terjadi.

Menurut Agus Widjojo, yang terpenting yakni bagaimana masyarakat mampu mewujudkan nilai-nilai luhur dimasa lalu untuk kemudian dibawa hingga masa sekarang. Dirinya memandang masyarakat sekarang mudah puas dengan jargon dan slogan-slogan semata. "Masalahnya kita cukup puas dengan jargon dan slogan-slogan. Sebagai contoh jargon Revolusi Mental. Kita mampu

mengucapkan tetapi tidak pandai dalam mengimplementasikannya. Dalam Skenario Indonesia 2045 yang dipaparkan oleh Agus Widjojo, dihasilkan tiga skenario yakni skenario optimistis, skenario optimistis sedang, dan skenario pesimistis.

Dalam skenario optimistis, digambarkan bahwa partai politik akan membina SDM untuk menghasilkan kader pimpinan yang berkualitas. Kualitas SDM parpol diharapkan akan memberi pilihan kepemimpinan nasional yang efektif. Selanjutnya akan terwujud kebijakan publik yang efektif baik untuk pembangunan bangsa maupun pencapaian kepentingan nasional. Di samping kebijakan publik, kebijakan pertahanan pun menjadi bagian menyeluruh dari kebijakan lintas sektoral nasional dalam perspektif *'whole of government approach'*.

Skenario selanjutnya yaitu optimistis sedang, yakni gambaran di mana Indonesia mampu memperbaiki kualitas pendidikan guna meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai warga dunia. Cara berpikir manusia di Indonesia mengalami perubahan secara





bertahap perlahan, serta kebijakan masih belum terasa integratif.

Pada skenario pesimistis, disebutkan Indonesia tidak mampu keluar dari perangkap budaya guna tanggap menghadapi perubahan di masa depan. Tantangan masa depan akan dihadapi dengan cara masa lalu yang penuh dengan kenangan akan zaman keemasan terdahulu. Fungsi pemerintahan akan dipenuhi dengan pendekatan kepentingan yang tidak membawa kemajuan bangsa, yang mengakibatkan Indonesia akan tertinggal dalam kompetisi dengan negara-negara lain. Pada skenario ini, bonus demografi dapat diselamatkan dari beban namun belum cukup untuk meningkatkan kualitas roda pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, teknologi, karena belum mencapai puncaknya.

Menjelang satu abad Indonesia merdeka, seluruh pemangku kepentingan harus mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang digambarkan di setiap skenario agar bersama-sama dapat menjamin dan memastikan bahwa tujuan dan cita-cita terbentuknya NKRI seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tetap dapat terwujud. [AS]

*Dalam Skenario  
Indonesia 2045  
dihasilkan tiga skenario  
yakni skenario optimis,  
skenario optimis  
sedang, dan skenario  
pesimis*





# Lemhannas Perlu Pertahankan Kinerja

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin oleh Dr. Heru Kreshna Reza tengah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Lemhannas RI tahun anggaran 2017 selama kurang lebih dua bulan di Lemhannas RI yang dimulai sejak 18 Januari 2018. Pemeriksaan di lingkungan unit kerja Lemhannas RI dimulai dengan pelaksanaan taklimat awal atau pemberian arahan dan informasi terkait pemeriksaan keuangan yang dilakukan di hadapan seluruh pimpinan struktural Lemhannas RI, di ruang rapat Nusantara II Gd Trigatra pada 18 Januari 2018.

**H**eru mengemukakan tujuan audit BPK yaitu untuk menilai kewajaran laporan keuangan lembaga. Hal tersebut dilakukan karena laporan keuangan tersebut menjadi media yang digunakan oleh pimpinan, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban keuangan atau belanja yang diberikan kepada Lemhannas. "Kami tidak melihat salah benar, tetapi dilihat dari kewajarannya. Makin tidak wajar makin tidak bagus, makin wajar makin baik," kata Heru. Dalam melakukan

audit, BPK mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di antaranya kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap Perppu, dan efektivitas sistem pengendalian internal oleh Inspektorat.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada saat penyerahan DIPA tahun 2017, untuk mendorong keuangan negara yang lebih baik lagi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersifat wajib bagi setiap kementerian/ lembaga. "Presiden menegaskan target tahun depan semua kementerian dan lembaga memperoleh opini WTP.

Dengan penilaian laporan keuangan WTP, otomatis sudah menunjukkan kinerja. WTP menjadi salah satu ukuran (kinerja), tapi bukan satu-satunya," jelas Heru. Lingkup sasaran audit BPK meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca, catatan atas laporan keuangan (CaLK) termasuk di dalamnya terdapat laporan keuangan badan layanan umum (LK-BLU).

Gubernur memberikan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan untuk mempersiapkan semua dokumen dan informasi yang dibutuhkan. "Untuk



Lemhannas RI menerima kedatangan Tim BPK dalam rapat Taklimat Awal BPK

menjamin kelancaran pemeriksaan, diharapkan pada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI agar membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim BPK dan menjalin kerja sama yang baik dengan menyediakan dokumen dan informasi yang menjadi lingkup pemeriksaan tim pemeriksa BPK RI," kata Agus Widjojo. Gubernur berharap agar seluruh pegawai Lemhannas bersikap terbuka pada saat pemeriksaan dan menjalin kerja sama yang baik dengan BPK agar tim pemeriksa dapat melakukan penilaian secara objektif. "Teman-teman unit kerja jangan ragu-

ragu untuk membukakan semua dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan BPK. Tentu ada dinamika dalam pemeriksaan. Untuk itu, jalin hubungan kerja sama dengan harmonisasi," ujar Agus Widjojo pada saat membuka kegiatan taklimat awal BPK di Lemhannas RI. [AS]

“ Gubernur berharap agar seluruh pegawai Lemhannas bersikap terbuka pada saat pemeriksaan dan menjalin kerja sama yang baik dengan BPK



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (kiri) bersama Ketua Tim BPK Dr. Heru Kreshna Reza (kanan)

# Reorientasi Kurikulum Dikti Hadapi Revolusi Industri 4.0

**E**ra revolusi industri 4.0 atau era digitalisasi yang masif sudah tiba di Indonesia, dan hal tersebut perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Pesatnya perkembangan teknologi tentunya berdampak pula bagi Pendidikan Tinggi, oleh karenanya diharapkan agar segera dilakukan rekonstruksi kurikulum, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Sistem serta program Pendidikan Tinggi perlu disesuaikan agar relevan dengan revolusi industri keempat, dengan memberikan mahasiswa keterampilan atau kompetensi yang lebih luas dan baru, serta menggunakan format baru dalam proses pembelajaran (dalam bentuk *face to face*, *blended learning*, maupun *full online learning*). Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, di hadapan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) UNS Surakarta Angkatan II, di ruang NKRI, Gd. Pancagatra Lemhannas RI, Sabtu (27/1/2018).

Reorientasi kurikulum dilakukan untuk membangun kompetensi yang diperlukan, di antaranya kompetensi pendidikan, kompetensi riset (fundamental dan terapan), kompetensi komersialisasi hasil penelitian dan inovasi (hilirisasi), kompetensi dalam era global (mampu berinteraksi dan berkontribusi secara global), kompetensi dalam memprediksi strategi masa depan dan kompetensi dalam *entrepreneurship*.

Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan amanat kepada pimpinan perguruan tinggi wajib mendukung inovasi untuk menghadapi perubahan global dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Nasir terus menggalakkan misi Kemenristekdikti, yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi memasuki era revolusi industri ke empat, yakni biaya kuliah yang semakin mahal,





terbatasnya jumlah dosen, sedangkan jumlah mahasiswa yang semakin bertambah. Dalam paparannya kepada peserta Taplai UNS angkatan II, Menristekdikti menyampaikan solusi yang bisa diambil dalam menghadapi tantangan tersebut yakni dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas (efektif dan efisien) dengan tetap mempertahankan mutu.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Moh. Nasir menyebutkan bahwa sebanyak 132,7 juta orang (dari jumlah populasi di Indonesia 262 juta jiwa) aktif sebagai pengguna internet. Sedangkan waktu yang dihabiskan untuk berselancar di internet menggunakan ponsel yakni 3,5 jam/hari, jika di-

bandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 1,9 jam/hari. Atas dasar fakta tersebut, ia menyebutkan, sudah seharusnya kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti terkait era digital dan revolusi industri keempat yaitu perlunya penyesuaian antara Paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan era industri 4.0. Pemerintah juga perlu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan indeks teknologi masuk ke dalam peringkat global, serta meningkatkan kegiatan riset dan publikasi yang relevan dengan tema industri 4.0. [AS]

“

***Dalam menghadapi tantangan, yakni dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas (efektif dan efisien) dengan tetap mempertahankan mutu.***

*- Menristekdikti RI  
Mohamad Nasir*



## Kisnu Haryo :

# Kesadaran Membangun NKRI Berawal dari Pemahaman Wasbang dan Pancasila

“Karakter bangsa harus lah dibangun sejak kecil, sebab sekarang jati diri bangsa mulai luntur,” ujar Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan HAM Lemhannas RI Kisnu Haryo, S.H., M.A. di hadapan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Prodi PPKn) IKIP Veteran Semarang di Gedung Astagatra Lemhannas RI pada Rabu, 18 Januari 2018.

**K**isnu Haryo menyampaikan pentingnya wawasan kebangsaan untuk dimiliki oleh setiap individu. “Ketahuilah dahulu halaman rumah sendiri, yang artinya mereka harus mengenal lingkungan sekitar kita sendiri baru memperluas seluruhnya,” ujar Kisnu Haryo. Menurutnya, dengan memahami wawasan kebangsaan, seseorang mampu membangun karakter dan kesadaran terhadap jati diri dan sistem nasional dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara. Kepada rombongan mahasiswa yang didampingi oleh Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi PPKn Drs. Srihadi, M.Pd., Kisnu Haryo menjelaskan empat konsensus dasar negara, ideologi, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan

bernegara. Sebagai calon guru PPKn, Kisnu Haryo berharap mahasiswa IKIP Veteran Semarang dapat membangun kesadaran pentingnya wawasan kebangsaan terhadap siswa. Lebih lanjut Kisnu Haryo menyampaikan bahwa dalam mendidik siswa SD, SMP, dan SMA, harus ditunjang dengan sejarah perjuangan agar menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme.

Dalam memahami Pancasila sebagai dasar bagi bangsa Indonesia, perlu diawali pula dengan pemahaman tentang arti ideologi. Hal tersebut dengan latar pemikiran bahwa dalam membangun sistem nasional ataupun sistem pemerintahan, Pancasila merupakan alat untuk menyatukan bangsa dan negara.

Kisnu Haryo menggambarkan ideologi seperti sebuah organisme, yang bisa lahir, berkembang-biak,

dan mati. Ideologi mempunyai tiga dimensi, yang pertama adalah dimensi realita, lalu dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realita menjelaskan bahwa ideologi itu lahir, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakatnya. Ideologi bisa dikatakan mati apabila nilai-nilainya ditinggalkan. Lalu dimensi idealisme, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia ternyata mempunyai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Terakhir, dimensi fleksibilitas yaitu ideologi yang dapat tumbuh dan berkembang pasti dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika masyarakat. Kisnu Haryo menekankan bahwa Ideologi harus fleksibel, jika tidak maka ideologi akan kaku dan mati.

Berbicara mengenai ideologi, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang



mengandung lima nilai. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan.

Kisnu Haryo menyimpulkan bahwasanya kesadaran membangun NKRI berawal dari wawasan kebangsaan dan pemahaman akan ideologi Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa seperti yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Diharapkan pemahaman akan kebangsaan dan Pancasila ini mampu menjadi tameng dalam menghadapi ancaman-ancaman kebangsaan seperti fundamentalisme, radikal, dan terorisme.

“ *Kesadaran membangun NKRI berawal dari wawasan kebangsaan dan pemahaman akan ideologi Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa*

- Taprof Lemhannas RI Kisnu Haryo S.H., M.A.

Foto bersama mahasiswa IKIP Veteran Semarang



# Gubernur Lemhannas RI Bertolak ke Amerika Serikat

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan lawatan ke Amerika Serikat selama delapan hari, guna menghadiri agenda pertemuan dalam rangka memperkuat kerja sama bidang pertahanan dan keamanan dengan AS(24/1).

**D**alam lawatannya kali ini, Agus Widjojo mengikuti beberapa agenda di antaranya menghadiri forum diskusi di Westminster Institute, mengikuti *roundtable discussion* di *Center for a New American Security (CNAS)*, *presentasi* di *Center for Asia Pacific Policy (RAND Corporation)*, kunjungan ke National Defense University, serta memberikan paparan terkait reformasi TNI di USINDO.

## Westminster Institute

Di Westminster Institute, Agus Widjojo menyampaikan materi terkait demokrasi dan pluralism di Indonesia, serta bagaimana pengaturannya berdasarkan kehidupan yang heterogenitas (masyarakat dan keanekaragamannya) pada Rabu (24/1).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa serta agama, dipersatukan dengan adanya Pancasila yang di dalamnya terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan data dari

Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Indonesia terdapat 17.504 pulau, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017. Oleh karenanya kebijakan maritim menjadi prioritas pemerintah, guna menghubungkan maupun menjaga kedaulatan serta lebih mengeksplorasi sumber kekayaan laut.

Selain bicara kemaritiman, Agus Widjojo juga bercerita mengenai sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga akhirnya mampu bangkit menjadi negara demokrasi seperti saat ini. Indonesia masih terus menata dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan terus membangun institusi pemerintahan yang kuat dan bersih. Pendiri negara mengakomodir perbedaan yang ada melalui konstitusi/UU yang menjadi komitmen/konsensus bersama. Ciri masyarakat Indonesia antara lain cenderung emosional dan mudah berubah manakala melihat pimpinannya berbuat salah, oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang benar dan tegas melalui

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat memberikan presentasi tentang “Indonesia Update”





“ *Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa serta agama, dipersatukan dengan adanya Pancasila yang di dalamnya terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika*

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo



pemilihan secara langsung (pemilu) oleh rakyat.

Agus Widjojo juga angkat bicara terkait isu Laut Tiongkok Selatan (LTS). Menurutnya kebijakan Indonesia dengan menjaga kedaulatan negara dan tidak melakukan klaim sepihak dan disesuaikan hukum internasional yang berlaku serta penyelesaian isu LTS harus menggunakan dialog tanpa kekuatan militer dari negara-negara yang berkepentingan di kawasan LTS.

### **Center for a New American Security (CNAS)**

Di hari kedua (25/1), Agus Widjojo menghadiri agenda *round table discussion* (RTD) yang diikuti oleh peserta berlatar belakang akademisi dan peneliti, serta US military di CNAS. Tema yang diangkat dalam RTD mengenai tranformasi militer Indonesia, kerjasama keamanan/ pertahanan Indonesia – US, Jakarta Geopolitical Forum, dan kemungkinan kerjasama dengan CNAS.

Militer Indonesia menjadi dominan sejak awal kemerdekaan

sampai dengan Pemerintahan Presiden Suharto pada masa tersebut, Militer mendominasi dengan dwifungsinya melalui penguasaan politik serta seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah era Reformasi, dimulai dari mundurnya Presiden Suharto tahun 1998, TNI mentransformasi diri sesuai Undang-Undang dengan tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan menjadi alat pertahanan sejalan dengan dibentuknya Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hubungan atau kerjasama pertahanan antara Indonesia dan AS selama ini naik dan turun, TNI meningkatkan kerjasama dengan AS berupa pembelian alutsista, meningkatkan *capacity building* dengan mengirimkan siswa militer ke AS maupun sebaliknya.



## RAND Corporation (Center For Asia Pacific Policy)

**A**gus Widjojo menghadiri presentasi yang diadakan anggota RAND Corporation dengan tema "Penilaian awal bagi kemampuan dan ancaman keamanan wilayah maritim Indonesia" (25/1). Sebelumnya RAND telah melakukan riset terhadap maritim Indonesia pada tahun 2016, termasuk terhadap institusi-institusi pemerintah yang membidangi kemaritiman seperti TNI AL, Bakamla, Polair, Dirjen Beacukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimana Presiden membentuk satgas pemberantasan *illegal fishing*.

Hasil riset tersebut dipresentasikan dihadapan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta orang delegasi Lemhannas. Hasil riset RAND menyebutkan bahwa penyeludupan yang sering terjadi di wilayah Maritim Indonesia antara lain berupa narkoba, manusia, senjata, produk-produk palsu, tumbuh-tumbuhan dan komoditas ekspor maupun import. Sedangkan untuk *illegal fishing* termasuk di dalamnya korupsi, penipuan, penggelapan pajak, transaksi internal dan kejahatan pencucian uang. *Illegal migration* dari negara-negara konflik juga marak terjadi yang mengarah ke Australia maupun Indonesia.

Dalam presentasinya, RAND memberikan pandangan terhadap kondisi maritim di Indonesia, menurutnya Indonesia perlu membentuk atau menciptakan kualitas institusi yang mampu menghadapi tantangan dan ancaman kemaritiman secara spesifik seperti pembentukan Satgas *illegal fishing* guna mendukung UU perikanan. Kendala lain yang dihadapi yakni karena kurangnya atau terbatasnya sarana infrastruktur yang dimiliki Indonesia serta banyaknya macam institusi penegakan hukum yang menangani keamanan Maritim di wilayah Indonesia.

## National Defense University (NDU)

Kunjungan Gubernur Lemhannas RI ke NDU diterima langsung oleh Rektor NDU Dr. John Yaeger, RADM (ret) Gerald Mauer, Dr. Cynthia Watson beserta siswa militer Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di NDU (26/1). Agenda Gubernur di NDU di isi dengan pemberian presentasi terkait *company profile* NDU beserta organisasinya. Selain itu dipaparkan pula terkait kurikulum pendidikan serta latar belakang pengajar dan siswa. NDU merupakan institusi pendidikan tertinggi bagi sipil dan militer dari berbagai institusi termasuk dari militer internasional. NDU juga memiliki fungsi memberikan masukan serta saran kepada pemerintah AS.





Gubernur Lemhannas RI setelah memberikan paparan di USINDO

## USINDO

Lawatan gubernur selanjutnya yakni mengunjungi USINDO yakni organisasi non-pemerintah yang mendedikasikan diri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Amerika Serikat mengenai Indonesia, pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Amerika Serikat, serta memperkuat hubungan antar dua negara. Pada kesempatan tersebut, Agus Widjojo mempresentasikan terkait Reformasi TNI dalam konteks Transisi Demokrasi di Indonesia.

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh audiens di antaranya mengenai prospek kerjasama pertahanan AS dan Indonesia. Menurut Agus Widjojo, pemerintah RI memegang teguh prinsip kerjasama pertahanan yang mencerminkan sikap saling menghormati dan menguntungkan. Kerjasama pertahanan RI-AS yang telah terjalin sekian lama tentunya masih dapat terus berkembang selama kedua belah pihak menghormati prinsip-prinsip tersebut.

## Kantor Berita VoA

Acara diskusi dan tanya jawab bersama Gubernur Lemhannas RI juga diadakan di kantor berita VoA yang diikuti oleh sekitar 20 orang awak berita VoA Indonesia. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator yaitu Nadia Madjid yang juga berprofesi sebagai jurnalis di VoA.

Gubernur menanggapi beberapa pertanyaan dari awak berita terkait adanya pelaksana tugas kepala daerah yang

berasal dari perwira POLRI aktif. Agus Widjojo menyampaikan, permasalahan tersebut perlu dikembalikan kepada asas legalitas yang ada. "Permasalahan tersebut selayaknya harus dikembalikan pada asas legalitas, dimana ada dua undang-undang yang bersimpangan yaitu UU Pilkada dan UU Polri, Untuk itu, lazimnya rujukan ditujukan kepada peraturan yang lebih mengikat. Dalam hal ini, sebagai anggota POLRI tentunya mengacu pada UU POLRI bahwa anggota POLRI aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis," kata Agus Widjojo menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, peserta diskusi juga mengajukan pertanyaan terkait dengan pengaruh politik identitas yang kembali marak di tanah air jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Agus Widjojo mengatakan, "Pengusung politik identitas hanya merupakan *noisy majority* dalam struktur masyarakat Indonesia. Akan tetapi, secara *silent majority*, Indonesia adalah rumah bagi kebhinnekaan dan wawasan masyarakat semakin bertambah kedewasaannya," kata Agus Widjojo. Sehingga Agus Widjojo meyakini bahwa pengusung politik identitas tidak akan berhasil dalam Pemilu mendatang. [AS]



Ketua UKP-PIP Yudi Latif memberikan penjelasan terkait makna Pancasila kepada peserta Taplai EO Indonesia

## Yudi Latief:

# Indonesia Tanpa Pancasila, Bagaikan Sapu Lidi yang Berserakan Tanpa Ikatan

*Civic Intelligence* atau kecerdasan kewargaan dinilai sebagai suatu kecerdasan baru yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yakni kemampuan untuk mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan untuk menautkan prestasi pribadi ke dalam harmoni kebersamaan.

**B**angsa Indonesia harus masuk ke dalam *civic beauty*, menjalankan kewajiban dan hak di dalam ruang publik, dan kita harus menjalani kerja sama sebagai suatu *civic joy*, riang. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu menjalani kehidupan dalam keberagaman, ikut serta dalam urusan publik harus dengan keriangannya," ujar Yudi Latief Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada saat menyampaikan materi dihadapan peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Enterpreneur Organization (EO) angkatan II, Rabu (7/1) pagi di Lemhannas RI. Kegiatan tersebut diikuti oleh 96 peserta, 74 orang di antaranya berasal dari EO Indonesia, 20 orang dari Kementerian Perindustrian, dan 2 orang dari Pemuka Agama.

Menurut Yudi, permasalahan yang kerap dihadapi bangsa ini ketika capaian-capaian pribadi seseorang, sulit untuk berjejaring membentuk kekuatan kebersamaan. "Problem kita justru ketika capaian - capaian pribadi itu harus berjejaring menjadi suatu kekuatan *collectivate*. Karena selama ini pendidikan kita, selalu jika dikatakan kecerdasan itu hanya dikatakan kecerdasan personal yang diukur semacam oleh IQ, matematika, fisika, kimia, itu juga yang dijadikan ujian nasional kita," ujar Yudi.

Berbicara mengenai Pancasila, menurutnya Pancasila menjadi inspirasi dalam berprestasi, bukan hanya prestasi sebagai individu tetapi menjadi prestasi bersama. Pancasila menggambarkan Indonesia sebagai suatu *heterogenitas multikulturalisme* yang disimbolisasikan oleh kelima silanya. Yudi menjabarkan satu persatu

kepada para peserta taplai EO terkait makna dari kelima sila Pancasila tersebut.

Seperti pada sila pertama yang menyiratkan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan multi agama. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dengan lima agama yang diakui secara administrasi oleh negara. "Agama jangan dikacaukan dengan agama yang tidak diadministrasikan oleh Kementerian Agama. Kemenag yaitu fungsinya administratif bukan fungsi pengakuan," tegas Yudi.

Sedangkan sila kedua menggambarkan Indonesia atas dasar kemajemukan asal usul ras manusianya. Penting untuk diketahui bahwa golongan ras pertama yang menduduki nusantara adalah ras Papua



Melanesoi. Sila ketiga berlandaskan Pancasila, dan yang terpenting Pancasila menjadi titik tuju atau bintang penuntun (*lead star*) bagi bangsa Indonesia. "Indonesia tanpa Pancasila bagaikan sapu lidi yang berserakan tanpa ada ikatan yang kuat. Nilai-nilai Pancasila itulah yang menyatukan kita," ujar Yudi.

Sila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menurut Yudi Latief menggambarkan bangsa Indonesia atas dasar kemajemukan lapisan kelas sosial masyarakat. "Dulu ada intervensi politik kolonial yang terus kita pertahankan sampai saat ini. Setelah kemerdekaan, mestinya seluruh sistem pengklasifikasian sosial kolonial itu ambruk, artinya kita semuanya diberlakukan sebagai *first class citizen*. Nasionalisme bukan soal dimana kita bermula, tapi apa yang kita perbuat," kata Yudi Latief.

Pancasila merupakan titik temu dari segala keberagaman nusantara, selain itu juga sebagai titik pijak dari segala pembangunan negara, mulai undang-undang hingga berjalannya

hukum harus berlandaskan Pancasila, dan yang terpenting Pancasila menjadi titik tuju atau bintang penuntun (*lead star*) bagi bangsa Indonesia. "Indonesia tanpa Pancasila bagaikan sapu lidi yang berserakan tanpa ada ikatan yang kuat. Nilai-nilai Pancasila itulah yang menyatukan kita," ujar Yudi.

Yudi Latief mengatakan, bangsa Indonesia perlu memahami lima isu strategis dalam membumikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pertama, terkait pemahaman Pancasila yang perlu dibenahi terlebih dahulu oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya perihal inklusi sosial, yakni cara mempersatukan bangsa dengan segala kemajemukannya.

"Sekarang di dalam konektivitas teknis yang tidak ada jarak lagi, tetapi rasa berbangsa kita makin berkurang. Itu yang harus dikembangkan lagi," kata Yudi. Menurutnya, para peserta taplai EO sebagai pelaku usaha memiliki fungsi yang sangat penting yang mampu menjadi aktor yang dapat berperan sebagai agen sosial. Karena usaha tidak hanya memiliki modal ekonomi (*economy capital*) tetapi juga memiliki kemampuan modal sosial (*social capital*). "Dengan jaringan bisnis yang luas, karyawan yang banyak, perusahaan-perusahaan bisa merangkap *social*

*capital* dan fungsi edukasi sebagai suatu civic culture itu bisa dibangun," terang Yudi.

Sedangkan isu ketiga adalah keadilan sosial, yang menurut pandangan Yudi di Indonesia kondisinya cenderung mengkhawatirkan karena termasuk ke dalam enam negara dengan kesenjangan sosial yang lebar. Kondisi tersebut dapat berakibat pada timbulnya sentimen primordialisme atau loyalitas berlebihan yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.

"Saat ini sering muncul gugatan ketidakadilan, tetapi ketidakadilan tidak bisa dikorbankan dengan mengorbankan persatuan. Sebaliknya, demi persatuan, tidak bisa mengorbankan keadilan. Keduanya itu ibarat sepasang sayap Garuda yang harus terbang bersamaan," kata Yudi Latief menegaskan.

Kepala UKP-PIP ini kembali menjelaskan, isu keempat yang tak kalah pentingnya yakni Pelembagaan Pancasila. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas nilai abstrak tetapi dapat diturunkan kedalam lembaga, baik ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya." [AS]

“  
*Civic Intelligence  
 atau kecerdasan  
 kewargaan dinilai  
 sebagai suatu kecerdasan baru  
 yang dibutuhkan oleh bangsa  
 Indonesia, yakni kemampuan  
 untuk mengerti hak dan  
 kewajiban sebagai warga  
 negara, serta kemampuan untuk  
 menautkan prestasi pribadi ke  
 dalam harmoni kebersamaan.*

- Ketua UKP-PIP Yudi Latief





Puncak Acara Perayaan Natal 2017 dibuka oleh sambutan dari Brigjen TNI Mindarto, selaku Ketua Panitia

## Redam Suhu Pilkada 2018 dengan Damai dan Kasih Natal

**S**ejumlah staf Lemhannas RI mengikuti perayaan Natal 2017 yang diselenggarakan oleh panitia Natal di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI Kamis (24/1). Menghadirkan bintang tamu yakni Kapten Yosua, yakni prajurit TNI AD yang videonya pada saat bernyanyi sempat viral di sosial media karena mendapat banyak pujian dari netizen, yang sekaligus menjadi MC acara tersebut bersama dengan Bripka Dewi Sekar Wulan.

Brigjen TNI Mindarto sebagai ketua panitia perayaan natal, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelum puncak acara diadakan, ada beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan salah satunya bakti sosial. "Perayaan natal ini merupakan bagian dari kegiatan lembaga, terdapat beberapa rangkaian kegiatan, sebelumnya kami telah membagikan kacamata dan handuk gratis kepada seluruh personel Lemhannas RI, dan mengantarkan sembako ke tiga panti asuhan," ujar Brigjen TNI Mindarto Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI.

Kegiatan bakti sosial dilakukan dengan memberikan sembako dan uang tunai kepada tiga panti asuhan yakni Panti Asuhan Pondok Taruna, Rumah Panti Muslimin, dan Panti Asuhan Vincentius Putri. Pemberian bingkisan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial, dan tali kasih.

Gubernur Lemhannas RI yang dalam sambutannya diwakili oleh Deputy Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto mengungkapkan bahwa sudah semestinya umat kristiani dapat menemukan makna dan relevansi dari perayaan natal ini. "Perayaan natal hendaknya menjadi momentum indah bagi kita untuk menyadari kembali tugas perutusan serta komitmen kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Karsiyanto.

Selain itu Karsiyanto juga menyinggung terkait pelaksanaan pilkada 2018 mendatang yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya masyarakat harus mampu menyikapi dinamika politik pada pilkada mendatang secara bijak dan cerdas, agar isu-isu intoleransi dapat



diredam. “Mencermati dinamika politik tersebut kita harus menyikapinya dengan bijak dan cerdas, karena sudah tentu suhu politik dalam penyelenggaraan pemilu/kada tersebut akan semakin meningkat,” ujar Karsiyanto.

Di akhir sambutannya, ia berharap agar umat Kristiani dengan semangat natal mampu menjaga kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara. “Nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan kesetaraan juga harus ditingkatkan dan dijadikan dasar etik tatanan kehidupan bermasyarakat, maka isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan tumbuh dan berkembang di masyarakat,” ujar Karsiyanto.

Acara perayaan dimeriahkan oleh penampilan anak-anak Pondok Taruna Orphanage yang membawakan permainan angklung serta penampilan dari Paduan Suara Lemhannas RI, dan Paduan Suara TNI AL. Di sela-sela acara dilakukan pemberian bingkisan secara simbolik kepada perwakilan dari tiga panti asuhan yang menerima sumbangan bakti sosial dari panitia natal Lemhannas RI.

Acara perayaan natal tersebut mengangkat tema “Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah dalam Hatimu”. Di samping acara hiburan oleh paduan suara dan penari, juga diisi dengan penyampaian pesan natal oleh Pastor Romo Hibertus MSF, dan Doa Syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Sapta Siagian Mth. Romo Hibertus berpesan kepada umat kristiani di Lemhannas RI agar dapat menjadi duta-duta kedamaian dan cinta yang dimulai dari diri sendiri, hingga meluas ke lingkungan masyarakat. “Karena dapat dilihat dalam kehidupan kita, budaya kasih diubah jadi budaya kebencian. Kebenaran diubah dengan kepalsuan. Budaya toleransi berubah menjadi perpecahan, atau intoleran. Mekanisme ini sungguh relevan dalam kehidupan kita,” kata Romo Hibertus. [AS]

“Masyarakat harus mampu menyikapi dinamika politik pada pilkada mendatang secara bijak dan cerdas, agar isu-isu intoleransi dapat diredam”

- Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional  
Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto





## Urgensi Rancangan Undang-Undang Wawasan Nusantara

**W**awasan Nusantara (Wasantara) menjadi salah satu dari tiga rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh DPD RI. RUU itu diharapkan menjadi pedoman seluruh pihak dalam menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wasantara merupakan sebuah doktrin operasional dari empat konsensus dasar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjadi kesepakatan konsensus dasar bangsa. "Sebetulnya Wasantara adalah sebuah doktrin dan prosesnya itu adalah indoktrinasi. Jadi jangan takut dengan kata doktrin, tetapi lihat esensi dan hakikatnya. Bagaimana mewujudkan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan, melalui doktrin operasional," kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam FGD yang diselenggarakan oleh Media Group, Selasa (27/2) di Ruang Rapat Besar Media Indonesia.

Makna dari Wasantara yakni cara pandang bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan secara dialogis, oleh dinamika bangsa dengan kesejarahannya, kondisi objektif geografis maupun subjektif kultural serta ideal yang dijadikan aspirasi. Dengan kata lain, disebut sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 terhadap kondisi diri dan lingkungannya serta perwujudan tujuan Wasantara ke dalam dan ke luar.

“  
Makna dari  
Wasantara yakni  
cara pandang  
bangsa Indonesia  
yang manifestasinya  
ditentukan secara  
dialogis, oleh dinamika  
bangsa dengan  
kesejarahannya, kondisi  
objektif geografis  
maupun subjektif  
kultural serta ideal  
yang dijadikan  
aspirasi

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

Agus Widjojo memandang UU sebagai suatu *formalitas sistem hukum* yang mengikat (*legally binding*) setiap warga negara, sedangkan yang terpenting dari UU itu sendiri adalah gagasan atau konsep dari Wasantara dan konsultasi publik. "Kalau undang-undang ini tidak tajam atau salah, maka *legally binding* bisa menjadi tidak karuan terhadap warga. Padahal kita tahu sendiri bahwa banyak undang-undang yang harus diluruskan," jelas Agus Widjojo.

Namun demikian ada tantangan dalam penerapan RUU Wasantara tersebut, yakni dalam hal bentuk konkret implementasi dari RUU Wasantara yang nantinya akan mengikat warga negara. "Saya tidak mengatakan bahwa Wasantara ini tidak perlu diwadahi dalam UU, atau diwadahi dalam UU, tetapi kita punya kelemahan bahwa kita selalu tertarik dengan jargon atau rumusan yang seolah-olah bagi kita itu sudah selesai, tetapi ketika kita mau mengimplementasikannya kita lemah untuk mencari bentuk konkret implementasinya," ujar Agus Widjojo.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi RUU Wasantara dalam menentukan bentuk konkret dari sebuah doktrin kaidah prinsip yang mengikat. Agus Widjojo berharap bahwa gagasan RUU Wasantara jangan berhenti "Tujuannya bagus, tetapi jangan sampai dari atas menjadi sebuah gagasan dan angan-angan sampai ke bawah dalam bentuk undang-undang dia masih sebatas angan-angan, lantas siapa yang menerjemahkan?" tutur Agus.

Ia berharap jika RUU Wasantara nantinya disahkan dalam bentuk UU, maka perlu lebih banyak dilakukan





Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi salah satu *keynote speaker* dalam FGD yang digelar oleh Media Group



konsultasi publik dalam merumuskannya. Yakni dengan melibatkan para ahli, pihak pemerintah, masyarakat, dan berbagai *stakeholder* lain dalam memberikan masukan.

Menurut Agus Widjojo, perlu diingat bagi para pejabat negara ataupun para peserta pendidikan di Lemhannas yang nantinya akan menduduki jabatan strategis kenegaraan, baik regional maupun nasional dalam merumuskan berbagai keputusan atau kebijakan harus memikirkan implikasi dampaknya terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia.

"Hal ini kita sampaikan kepada para peserta pendidikan di Lemhannas, artinya nanti yang duduk di jabatan strategis kenegaraan, keputusan atau kebijakan apapun yang kalian rumuskan, jangan lupa implikasi dampaknya kepada untuk seluruh Indonesia. Jangan berpikir kalau kepala daerah hanya untuk daerahnya saja tetapi ingat dampaknya untuk seluruh Indonesia. Itu adalah hakikat dari Wasantara yang sebenarnya," kata Agus Widjojo menambahkan. [AS]

# Pegawai Lemhannas RI Mendapatkan Sosialisasi Aplikasi KRISNA

Segenap pegawai Lemhannas RI mendapat sosialisasi terkait dengan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) pada akhir Januari 2018 yang lalu. KRISNA merupakan sistem aplikasi kolaborasi yang dibentuk oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN/RB di tahun 2018. Mulanya, kementerian dan lembaga menggunakan Aplikasi dan Informasi Kinerja (ADIK), akan tetapi menghadapi berbagai dinamika yang dihadapi, maka perlu adanya pemutakhiran aplikasi. Pemutakhiran aplikasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja.



Kegiatan sosialisasi Fitur KRISNA di ruang Kresna, Gd. Astagatra Lemhannas RI

**A**plikasi tersebut dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. "Dalam sistem KRISNA terdapat fitur baru yang lebih informatif dan dapat dimanfaatkan untuk analisis data yang lebih baik," kata Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas RI Ir. Basah Hernowo, M.A, pada saat mengisi *workshop* pengenalan fitur KRISNA di ruang Kresna, Gd. Astagatra Lemhannas RI, Selasa (23/1). Hernowo mengatakan bahwa prioritas lain dari pembentukan aplikasi tersebut ialah pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Tujuan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bertemakan "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan" dengan prioritas nasional adalah sea games, pendidikan, dan kesehatan. Juga rencana pemerintah di

tahun 2019, yakni mencanangkan RKP bertema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan mengangkat pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar termasuk pendidikan, dan kesehatan menjadi prioritas nasional.

Manfaat KRISNA bagi K/L adalah sebagai basis data dan informasi perencanaan K/L, sebagai *monitoring* dan evaluasi, alat kontrol dan koordinasi dalam penyusunan renja dan indikator kinerja, serta untuk melihat kerangka logis (keterkaitan) antara sasaran strategis sampai dengan output yang dihasilkan.

"Penggunaan sistem KRISNA mempermudah dalam pengerjaannya karena sudah menjadi satu. Kemudian mengenai pelaksanaan tahap awal pengenalan KRISNA 1.0 masih diperlukan adaptasi sistem. Tahun yang akan mendatang yakni 2019 sistem KRISNA sudah *mature* dan berkembang menjadi KRISNA 2.0 yang lebih memberikan kemudahan bagi K/L," ujar Basah.

Fitur KRISNA dapat dimanfaatkan oleh K/L apabila ingin melakukan perubahan renja, serta dapat digunakan pula sebagai pusat keluhan kepada Bappenas mengenai perencanaan kerja hanya dengan mengaksesnya melalui *website* resmi krisna. system. KRISNA dapat dengan mudah dikoordinir oleh masing-masing biro perencanaan K/L. Basah menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi KRISNA 2.0 diantaranya berisi Prioritas Pembangunan dan penyusunan RKP, Bahan dalam Pelaksanaan Ratak K/L, Musrenbang (Provinsi & Nasional), Data Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN dan *Stakeholder* lainnya, dan Data dasar untuk *exercise baseline* dan Pagu.

Basah Hernowo juga menyampaikan terkait prioritas dalam peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, serta pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Menghadapi tahun politik 2018-2019 dimana akan dilaksanakan pilkada dan pemilihan presiden, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu juga di pandang sebagai prioritas utama RKP. "Disinilah Lemhannas berperan karena tahun 2019 akan diadakan pemilu presiden, masukan-masukan Lemhannas terhadap sektor lain sangat signifikan untuk bisa mendukung dari sisi belanja pemerintah," ujar Basah Hernowo.

Penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2019 Lemhannas RI berisi gambaran perbaikan kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan penganggaran di tahun 2018 yang sesuai dengan kebijakan pimpinan lembaga, pemerintah serta berpedoman pada peraturan Menteri PPN/ Bappenas. Penyusunan renja juga bertujuan untuk mengetahui tata cara penyusunan dan penelaahan renja kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [AS/DY]

“

**“Manfaat KRISNA bagi K/L adalah sebagai basis data dan informasi perencanaan K/L,”**

- Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan  
Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Ir. Basah  
Hernowo, M.A.



# Merit System untuk Profesionalisme ASN

Peningkatan profesionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sangat penting, karena hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.

**P**engelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang akuntabel. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Deputy SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja di hadapan seluruh ASN Lemhannas RI.

Sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Setiawan menjelaskan terkait kebijakan dan strategi peningkatan pembangunan kualitas ASN. Menurutnya pencapaian Smart ASN 2024 mendatang memiliki ciri yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, memahami informasi dan teknologi, memiliki kemampuan berbahasa asing, *hospitality*, *networking* serta berwawasan global. Ciri-ciri tersebut hendaknya diimplementasikan sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas hingga kesejahteraan.

Adanya masalah internal dan eksternal yang belum terselesaikan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kualifikasi atau kompetensi individu yang tidak sesuai dengan jabatan, masalah ketidakdisiplinan, adanya arus globalisasi, persaingan maupun tuntutan publik. Permasalahan tersebut mau tidak mau harus dihadapi agar Smart ASN dapat terwujud.

Dalam Roadmap Pembangunan ASN, RPJM yang merupakan penjabaran dari visi misi pemerintahan telah memasuki era ketiga bahkan akan segera diselesaikan yakni tahun 2015-2019. Ukuran yang akan dijangkau sampai akhir 2019 adalah menegakkan ASN Merit System. Merit System merupakan kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. "Seseorang yang duduk dalam sebuah jabatan





atau layak untuk dipromosikan apabila memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mumpuni. Tanpa harus melihat latar belakang, ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya,” kata Setiawan.

Merit system merupakan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja. Dengan terwujudnya sistem ini, rotasi jabatan tidak diperlukan lagi pemilihan karena BKN sudah punya database. Sementara saat ini jumlah ASN di Lemhannas RI sebanyak 591 orang, dengan formasi PNS 341 orang dan TNI/Polri 250 orang. Rencana ke depan setiap ASN akan dibagi ke dalam empat kuadran berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.

Seperti dikutip dari [menpan.go.id](http://menpan.go.id), pembagian kuadran dalam ASN adalah bertujuan untuk menciptakan Smart ASN. Kuadran 1, ASN yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai, serta berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini perlu dipertahankan dan siap dipromosikan. Kuadran 2, ASN yang kurang kompeten dan kurang memenuhi kualifikasi,

tetapi berkinerja baik. ASN dalam kuadran ini akan dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan. Kuadran 3, ASN yang memiliki kompetensi dan kesesuaian kualifikasi namun tidak mampu menunjukkan kinerja. Langkah yang dilakukan adalah melakukan rotasi atau mutasi, dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Kuadran 4, ASN yang tidak memiliki kompetensi, tidak sesuai dengan kualifikasi, dan tidak berkinerja. ASN pada kuadran ini dapat dievaluasi untuk dirasionalisasi. [AS/DY]

“  
*Seseorang yang duduk dalam sebuah jabatan atau layak untuk dipromosikan apabila memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang mumpuni. Tanpa harus melihat latar belakang, ras, agama, jenis kelamin dan sebagainya*

- Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja





Peserta PPRA LVII - LVIII Mancanegara saat mengikuti sosialisasi pengenalan Lembaga

## Pengenalan Konsep Ketahanan Nasional dan Astagatra pada Peserta PPRA LVII

Lemhannas RI sebagai lembaga pendidik calon pimpinan nasional turut berkontribusi dalam memberikan pemahaman ketahanan nasional bagi peserta pendidikan. Salah satu materi yang diberikan kepada para peserta PPRA LVII yakni tentang konsep Ketahanan Nasional (Tannas). "Dalam menjaga ketahanan nasional, bangsa Indonesia perlu mengembangkan kekuatan nasional melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, serta selaras, dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara," kata Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas RI Laksda TNI Riyadi Syahardani di ruang Gatotkaca (8/2).

Riyadi menyampaikan bahwa ada delapan aspek ketahanan nasional bangsa Indonesia yang terdiri dari Tri Gatra (geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam)

dan Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). "Negara Indonesia memiliki lima agama yang berbeda yang dianut oleh masyarakat. Ada banyak suku juga bahasa. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara harus selalu berjalan seiring dan harmonis," ungkap Riyadi.

Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat Indonesia harus memiliki sifat saling menghormati terhadap agama lain. Maka, strategi dalam mempertahankan Ideologi adalah dengan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila merupakan satu-satunya dasar negara yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan.

Adapun, implementasi nilai-nilai ketahanan nasional dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat, seperti toleransi, gotong royong, saling tolong-menolong dan menghargai. Diharapkan pula





dapat menghilangkan kerawanan yang mengandung unsur Suku, Agama dan Antar Golongan (SARA), meningkatkan keteladanan tokoh masyarakat, menghidupkan kearifan lokal dan selektif budaya, serta membina keluarga dan lingkungan.

Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, bangsa Indonesia senantiasa dihadapkan berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Maka, diperlukan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dalam aspek kehidupan nasional.

Sebagai komponen bangsa yang strategis, masyarakat diharapkan memahami dan mampu mengaktualisasikan Wawasan Nusantara (Wasantara) dan Ketahanan Nasional (Tannas) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. [AS/DY]

“*Dalam menjaga ketahanan nasional, bangsa Indonesia perlu mengembangkan kekuatan nasional melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, serta selaras, dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara*”

- Taji Bidang Demografi Lemhannas RI  
Laksda TNI Riyadi Syahardani



# Resmikan PPRA LVII, Gubernur Lemhannas RI Ajak Peserta PPRA LVII untuk Amanah dalam Mengemban Tugas



Peserta PPRA LVII - LVIII Mancanegara saat mengikuti sosialisasi pengenalan Lembaga

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengajak seluruh peserta PPRA LVII untuk menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan negara kepada peserta dengan niat yang tulus, karena kelak para peserta akan mengemban tugas sebagai pimpinan nasional. Berbekal latar belakang pengalaman dan kemampuan akademis yang berbeda-beda, para peserta diharapkan dapat lebih arif dan bijaksana selama mengikuti proses belajar di Lemhannas.

Saya yakin para peserta yang terdiri dari berbagai unsur dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan saling bertukar pengalaman satu sama lain," ujar Agus

Widjojo pada saat meresmikan pembukaan PPRA LVII dihadapan 100 orang peserta di ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Rabu (21/1).

Agus Widjojo menaruh harapan besar kepada peserta PPRA LVII agar dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, memiliki etika moral, kejujuran dan bukan semata-mata hanya mengejar formalitas pendidikan di Lemhannas RI. Dengan dimulainya PPRA LVII diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik para peserta, agar tujuan dan sasaran pendidikan di Lemhannas RI dapat tercapai secara optimal.

"Harus disertai tekad untuk melakukan revolusi mental, transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan







sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat dengan menunjukan bukti nyata bahwa peserta mengikuti dan memahami semua ketentuan dan prasyarat yang sudah disiapkan,” ujar Agus Widjojo. Menurutnya program pendidikan yang diselenggarakan di Lemhannas RI bertujuan untuk mempertajam serta meningkatkan kapasitas dan efektivitas kepemimpinan para peserta pada tingkat strategis.

Sedangkan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi berbicara mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI pada saat pengarah awal pengenalan kelembagaan. “Pada tanggal 20 Mei 1965 Lemhannas RI lahir oleh Presiden Soekarno. Di masa revolusi pada tahun 1965, kita tidak boleh hanya berbicara mengenai masalah senjata dan amunisi. Tapi Soekarno mengatakan bahwa kita harus berbicara tentang Geopolitik dan Geostrategi,” kata Arif Wachyunadi.

Dalam pemikiran seorang negarawan sekaligus politikus Indonesia Dr. Ruslan Abdul Gani menyebutkan bahwa 25 tahun lamanya pengabdian Lemhannas untuk kelangsungan hidup Indonesia memerlukan tersedianya para negarawan yang baru. Sayangnya, dalam kehidupan nyata partai politik belum berhasil mencetak negarawan. Disamping itu pula para aparaturnegara lebih berorientasi ke arah administratif. “Maka dari itu, Lemhannas mengadakan program pendidikan tentang wawasan kebangsaan untuk bisa meningkatkan kapasitas pengetahuan yang luas, serta menghilangkan hambatan mental dan spiritual antara pihak sipil dan militer. Dengan demikian bangsa dan negara akan dapat lebih terpadu serta akan lahir negarawan-negarawan baru yang lebih berkualitas melalui pendidikan di Lemhannas RI,” ujar Arif Wachyunadi.

Arif juga mengingatkan para peserta akan pentingnya mendalami pendidikan di lembaga think tank-nya presiden ini dengan mengutip pidato Bung Karno dalam pelantikan peserta pendidikan pertama Lemhannas RI tahun 1965 yang menekankan bahwa suatu negara dapat dikatakan kuat apabila memiliki sistem, pertahanan yang kuat. [AS/DY]

“

*“Kita tidak boleh hanya berbicara mengenai masalah senjata dan amunisi, tapi Soekarno mengatakan bahwa kita harus berbicara tentang Geopolitik dan Geostrategi”*

- Sestama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi



## e Learning

# E-Learning Permudah Peserta PPRA Belajar Jarak Jauh

Lemhannas RI dalam menjalankan fungsi pendidikannya bagi memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah diseminasi pelajaran bagi para peserta PPRA. Selama *off campus*, peserta PPRA LVII mendapatkan kesempatan belajar jarak jauh dengan menggunakan metode *e-learning*.

**M**etode ini bertujuan untuk membantu peserta agar lebih efektif dalam memanfaatkan waktunya, mengingat peserta pendidikan merupakan para pejabat strategis yang memiliki kesibukan serta keterbatasan waktu. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Biro Telematika Marsma TNI Indrianto Wibowo Leksono pada saat menyampaikan briefing terkait *e-learning* kepada para tutor pembina materi dan pendamping *e-learning*,

Jumat (23/2) di Ruang Krisna Gd. Astagatra.

Penggunaan *e-learning* juga dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan praktik pelatihan konvensional yang memakan biaya lebih mahal, serta memerlukan tempat dan fasilitas yang lebih banyak. Kemudahan lain yang didapat oleh peserta pendidikan Lemhannas melalui metode *e-learning* yakni materi pembelajaran dapat di akses kapanpun dan di manapun peserta berada.

Peserta pendidikan juga dapat mengunduh modul yang telah

diunggah di *website* Lemhannas, agar peserta dapat mempelajarinya sebelum tatap muka dengan pengajar dikelas. "Fungsi lain dari *e-learning*, peserta bisa mendapat semua modul, bahan ajar yang dibutuhkan. Sebelum pengajar memberikan materi di kelas materi sudah di upload ke sistem. Jadi, sebelum mendapat ceramah, sudah memegang materi agar dapat dipelajari terlebih dahulu," ujar Indrianto.

Metode *e-learning* digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para peserta dalam



“Penggunaan e-learning juga dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan praktik pelatihan konvensional yang memakan biaya lebih mahal, serta memerlukan tempat dan fasilitas yang lebih banyak.

- Kepala Biro Telematika Marsma TNI Indrianto W.L

menyiapkan diri untuk mengikuti materi pembelajaran yang akan diberikan oleh Lemhannas RI. Melalui aplikasi *chatting* dan *video conference (V-Con)* setiap harinya peserta pendidikan dengan didampingi oleh tutor dan staf telematika (sebagai operator) mendapat materi yang diberikan oleh Tenaga Ahli Pengajar dengan durasi empat jam untuk dua unit pelajaran (tiga hari untuk satu bidang studi).

Adapun, pelaksanaan kegiatan *chatting* diberikan waktu selama 120 menit dengan ketentuan bahwa peserta

telah siap pada 10 menit atau 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Sementara itu, 30 menit sebelumnya peserta sudah bisa membuka kegiatan *chatting* untuk bisa saling berkoordinasi satu sama lain sehingga pada saat materi akan dimulai semua peserta sudah online.

Sedangkan dalam sesi *V-con* merupakan studi kasus dimana pembina materi wajib memberikan pertanyaan kepada peserta yang berkaitan dengan *current issue*, agar pemikiran para peserta berkembang serta dapat

memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat strategis, dengan durasi tiga puluh menit waktu diskusi. Para tutor pendamping yang nantinya akan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan *e-learning*, serta diharapkan untuk selalu mencatat dan memeriksa kehadiran, dan memonitor keaktifan para peserta. [AS/DY]



# Lemhannas Libatkan Tokoh Pemuda, Masyarakat, dan Ormas Kawal Ketahanan Nasional

Implementasi konsep ketahanan nasional tidak terlepas dari cara pandang masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**L**embaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar Dialog Wawasan Kebangsaan yang melibatkan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Anggota Organisasi Masyarakat. Dialog yang digelar di Ruang Dwiwarna Purwa ini dalam rangka memperkokoh wawasan kebangsaan bagi masyarakat agar memahami arti penting nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Forum ini diharapkan dapat menumbuhkan wawasan kebangsaan yang tinggi serta semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan jaman dan berbagai rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan,"

kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada saat memberikan sambutan (1/3).

Mengangkat tema besar Memperkokuh Keutuhan NKRI dari sudut pandang perkembangan Lingkungan Strategis, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional, dialog kebangsaan ini menghadirkan tiga orang narasumber, di antaranya Taprof Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Taji Bidang Wawasan Nusantara Laksda TNI Yuhastihar, M.M., dan Taprof Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.

Menghadapi perkembangan strategis yang begitu cepat dan kompleks sehingga memaksa bangsa Indonesia untuk memperkuat diri dalam mempertahankan kelangsungan hidup

bangsa. Para peserta dialog yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda membuat Agus Widjojo merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan diskusi secara mendalam. "Dialog ini menantang karena peserta sangat bervariasi dari profesi, dan asal geografis suku bangsa, dilihat dari usia antar generasi yang masing-masing memiliki kerangka berpikir yang berbeda-beda, dan pengalaman hidup telah membawanya ke dalam kerangka pikiran tersebut," ujar Agus Widjojo.

Agus Widjojo mengawali dialog dengan memaparkan sedikit materi seputar nilai-nilai kebangsaan yang meliputi, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. "Ketahanannasionalitu seperti karet dan per, jika ditarik dan dilepas akan kembali kepada bentuk aslinya.





Foto bersama Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat saat Dialog Kebangsaan di Ruang Dwiwarna Purna Lemhannas RI

Sedangkan wawasan nusantara adalah kita menyadari bahwa negara kita mencakup suatu wilayah kepulauan yang luas terpisah dan dengan jarak yang luas dipisahkan oleh lautan," kata Agus Widjojo menjelaskan. Praktisnya, ketahanan nasional harus diwujudkan dalam satu kesatuan aspek Astagatra yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (*Ipoleksosbudhankam*).

Robert Mangindaan menyoroti perkembangan lingkungan strategis di Indonesia yang dipandangnya

sedang mengamali kondisi fragmented atau terpotong-potong disebabkan oleh *proxy* yang berakar dari tiga virus. "Indonesia sedang *fragmented*, kebijakan ekonomi, pertahanan, undang-undang, semuanya fragmented. Oleh karena tiga virus sudah masuk dari *proxy*," ujar lelaki yang akrab disapa Bob ini.

Tiga virus yang dimaksudnya adalah masyarakat yang cenderung senang berdusta, bersifat rakus, serta simulacra atau semi-realitas yakni bertindak berdasar pada realitas

tiruan yang tidak lagi mengacu pada realitas sesungguhnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Prof. Dadan mengungkapkan hal yang sama dalam konteks ketahanan nasional. Menurutnya Indonesia mampu menangkal virus-virus tersebut jika mampu kembali kepada konstitusi negara.

"Kita harus menjaga ketahanan nasional, yakni kemampuan kita untuk mengembalikan pada posisi jati diri dan stabilitas. Negara kita sedang kena virus, keserakahan. Tetapi kalau kita punya jati diri, maka dari itu cepat kita kembali kepada konstitusi," ungkapnya.

Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang dimiliki oleh Lemhannas RI dalam lima tahun terakhir meneliti dari delapan gatra Indonesia yang terlemah berada pada gatra sosial budaya, dan ideologi. "Ini bukan untuk mengkritik apa yang sudah ada, tetapi sebagai cerminan apa yang harus kita kuatkan sekarang ini. Memang betul virus-virus masuk dari luar, tapi seandainya kita mampu menangkal virus maka kita akan tetap eksis. Jangan salahkan orang lain, jangan mau dibodohi," ujar Prof. Dadan.

Sedangkan Yuhastihar berbicara tentang wawasan nusantara (*wasantara*) yang menurutnya dalam perspektif geopolitik terdapat tiga faktor yang harus dipahami dari suatu bangsa, yakni latar belakang sejarah bangsa tersebut, lalu kondisi negara dan tanah airnya, serta cita-cita bangsanya. "Ketiga faktor inilah yang menentukan kuat atau lemahnya suatu bangsa. Apabila tiga faktor dia ada yang lemah, berarti tatanan bangsa itu juga sudah lemah," ujarnya. [AS]



“*Forum ini diharapkan dapat menumbuhkan wawasan kebangsaan yang tinggi serta semangat kebangsaan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan jaman dan berbagai rong-rongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan,*”

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo



## Politik Uang, Isu SARA, dan Gagalnya Kaderisasi Parpol dalam Pilkada 2018

Jadi Topik Utama Dalam Forum Komunikasi antara Pemred dengan Pimpinan Lemhannas RI

Indonesia bakal menggelar perhelatan pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Pilkada kali ini lebih besar dibandingkan pemilihan sebelumnya. Seiring dengan pelaksanaan pemilu mendatang, terdapat beberapa catatan selama proses menuju Pilkada 2018 di antaranya, terdapat pendaftar calon kepala daerah yang berasal dari elemen TNI POLRI, baik yang telah purnawirawan maupun yang masih aktif, kemudian kepala daerah *incumbent* yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK, dan maraknya politik uang. Dinamika politik menjelang Pilkada ini tentunya menjadi tantangan bagi stabilitas ketahanan nasional.

**M**enanggapi isu tersebut Biro Humas Lemhannas RI menyelenggarakan forum komunikasi (Forkom) dengan melibatkan para Pemimpin Redaksi dari berbagai media massa dengan tujuan dapat saling berbagi informasi yang *faktual* dan *aktual* terkait isu tersebut, pada Rabu (14/3) di Anjungan Trigatra Lemhannas RI.

“Tantangan Ketahanan Nasional Menghadapi Pilkada 2018” menjadi tema hangat yang dibawakan dalam forum diskusi. Menurut Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bahwa partai politik belum bisa memanfaatkan pemilu yang semakin dekat untuk

mengkonsolidasikan internalnya, sehingga tidak siap menghasilkan kader yang berkualitas.

“Saat ini, parpol masih disibukkan dengan kepentingan politiknya. Parpol belum siap memunculkan kader yang akan dicalonkan. Indikatornya adalah dari *incumbent* atau *vote gather* yang bukan dari kader partai. Kaderisasi tidak diandalkan, masih yang ada saja,” kata Agus Widjojo menambahkan. Menurutnya, tidak ada basis ideologi yang menaungi parpol sebagai pembeda di antara satu parpol dengan lainnya, yang merupakan kelemahan dalam sistem politik. Akan tetapi, ketidakjelasan basis ideologi justru menjadi keuntungan bagi sistem politik Indonesia yang belum matang. “Karena basis ideologi kanan

dan kiri tidak terlalu jelas dalam sistem kepartaian Indonesia, maka itu bisa mengurangi potensi konflik antar dua kubu akibat perbedaan ideologi,” kata Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI.

Isu SARA dan santernya penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media juga masih menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Ditambah lagi ada ‘penumpang gelap’ yang memanfaatkan *hoax* karena memiliki kesamaan kepentingan. Agus Widjojo mengapresiasi tindakan Polri yang menindak tegas penyebar *hoax*. “Saya apresiasi tindakan Polri yang tegas dalam pemberantasan



Forum Komunikasi yang dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI, bersama Wagub dan para Pemimpin Redaksi Media Massa

“  
*Saat ini, parpol  
 masih disibukkan  
 dengan kepentingan  
 politiknya. Parpol  
 belum siap  
 memunculkan  
 kader yang akan  
 dicalonkan.*

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

sumber *hoax*. Tindakan hukum itu perlu, sebagai pilar demokrasi, tapi semua kembali dari diri kita untuk tidak percaya dan mengecek informasi,” katanya.

#### **Tantangan Dalam Mengelola Pilkada 2018 Untuk Ketahanan Nasional**

Dinamika Pilkada 2018 menjadi tantangan tersendiri dalam dinamika kebangsaan. Untuk itu, saat ini Lemhannas RI sedang melakukan kajian dengan memetakan potensi dan perspektif pertarungan pilkada. “Tantangannya adalah bagaimana mengelola pilkada dari perspektif ketahanan nasional, bukan kita kelola ketahanan nasional, tetapi kita kelola pilkadanya dengan perspektif ketahanan nasional, atau bidang kewaspadaan nasional,” kata Prof. Dadan melanjutkan.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi Suryopratomo menyebutkan bahwa perlu ada perbaikan pemahaman bahwa permasalahan bukan berada pada ketahanan nasional, tetapi pada syahwat

politik yang menghalalkan segala cara di dalam pertarungan. Tommy memandang sistem demokrasi di Indonesia dibangun secara terburu-buru, oleh sebab itulah peran partai politik sangat diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. “Supaya bisa terkelola, demokrasi itu harus cerdas wawasan kebangsaan. Bagaimana tugas partai politik dalam membangun demokrasi untuk membangun keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Pemimpin Redaksi Media Indonesia Usman Kansong juga memiliki pandangan yang sama mengenai sistem demokrasi Indonesia yang belum matang. “Demokrasi itu sifatnya mendadak, permasalahan bukan pada jumlah kandidatnya, ataupun jumlah putarannya, tetapi *hoax*, politisasi agama, dan sebagainya yang disebut Ketua Forum Pemred sebagai menghalalkan segala cara,” ujarnya. [AS]

# Sambut Revolusi Industri 4.0, Indonesia Akan Ciptakan 1000 Technopreneurs

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0, yakni era dimana perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya dengan menggelar *training* khusus bagi para penyelenggara negara seperti menteri dan para pegawai pemerintah (ASN) setingkat eselon I,II,III dan IV dari 34 kementerian di Indonesia. *Training* ini dikenal dengan *Collective Creative Learning and Action for Sustainable Solution (Co Class)* yang pada tahap awal akan menyasar pada 1000 peserta dengan 80 orang *trainer*.



Pelaksanaan rapat Pokja revolusi Industri bersama UID

**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ikut ambil bagian sebagai pelaksana harian, bersama dengan *United In Diversity (UID)* atau Yayasan Upaya Indonesia Damai sebagai mitra. "Kita diminta oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0. yaitu suatu perubahan mendasar yang nantinya akan mengubah cara berbagai hubungan baik antar manusia, bisnis dan lain sebagainya," ujar Soengeng Rahardjo tim UID pada saat rapat Pokja Revolusi Industri 4.0 di ruang Nusantara II, Gd.Trigatra Lemhannas RI, Selasa (13/3).

Seribu peserta akan dipersiapkan untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 melalui proses belajar dengan beberapa perubahan di antaranya pada sistem pendidikan, pengembangan bakat, serta sistem ketenaga-kerjaan. "Kita ingin masuk

proses pembelajaran tematik kepada suatu sistem tertentu, lahirlah *Co Class*. Fokus kami adalah bagaimana mentransformasikan *employment system*. Satu untuk mengangkat kualitas hubungan antara serikat buruh, dengan industri dan juga dengan pemerintah," ujar Frans Sugiarta yang juga sebagai anggota dalam Tim Pokja UID. Dalam kesempatan tersebut, diharapkan para peserta dapat menyebarluaskan pengetahuannya kepada masyarakat setelah mengikuti *Co Class*.

Sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo yang ingin menciptakan 1000 *Technopreneurs* hingga tahun 2020 untuk mengakselerasi pembangunan yang lebih bertanggung jawab. "Kami mendukung apa yang menjadi aspirasi Jokowi ingin menciptakan *technopreneurs* bahkan hingga 2020, dan untuk itulah mengapa kita perlu memikirkan sebuah ekosistem yang mampu menumbuhkan *technopreneurs* Indonesia untuk

menjadikan ekonomi Indonesia lebih bermartabat," kata Frans.

Salah satu urgensi perlunya pelaksanaan Revolusi Industri 4.0 adalah Indonesia akan menikmati bonus demografi di tahun 2030, diperkirakan jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. "Bagaimana kita melihat ini sebagai aset, jangan sampai yang dikatakan bonus demografi ini hanya sebatas kata-kata jargon belaka, karena kualitas dari generasi muda kita bukan menjadi bonus tapi malah menjadi *liberty*, dan ini akan menjadi ongkos besar bagi negara ini," ia menambahkan.

Menurut Frans, Indonesia perlu melakukan empat level transformasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, pada level satu yaitu transformasi individu, dari orang-orang yang fokus pada tugas, bertransformasi menjadi orang yang mengerti peran dan tujuannya bekerja dalam sebuah organisasi. Level kedua, pada organisasi, yakni transformasi dari





mentalitas *silo* menjadi *network*. Sedangkan pada level ketiga transformasi berada tingkat sistem yang semula eksklusif menjadi inklusif, yakni melibatkan komunitas di dalam proses pembentukan sistem. Transformasi level keempat berada pada *economic mono* dari semula *egocentric* menjadi *ecosystem centric*.

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa terdapat dua aspek utama di dalam revolusi industri 4.0 yakni aspek industri dan aspek mindset cultural. "Satu pihak ada yang berbicara dalam bahasa kaku industri, tetapi kalau saya lihat di situ juga banyak aspek-aspek *cultural* seperti *leadership, mindset, attitude,*" katanya.

Menurut Agus Widjojo program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan peradaban manusia. "Peradaban di Indonesia sangat tertinggal karena masih berada pada peradaban dendam, saling membenci dan menjerumuskan orang, ini yang perlu diangkat dalam masyarakat kita," ujar Agus Widjojo. [AS]



“

"Peradaban di Indonesia sangat tertinggal karena masih berada pada peradaban dendam, saling membenci dan menjerumuskan orang, ini yang perlu diangkat dalam masyarakat kita"

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo



“  
*Elemen pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu dan memberikan sumbangsih terbaiknya dalam upaya peningkatan kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan transnasional*  
 - Alumni PPRA LVI Lemhannas RI 2017  
 Kombes Pol Amur Chandra JB

## STRATEGI PEMERINTAH MELALUI PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Oleh: **Kombes Pol Amur Chandra JB**

Alumni PPRA LVI Lemhannas RI 2017

Dalam aspek keamanan, era globalisasi telah mendorong meningkatnya ancaman kejahatan transnasional dengan modus operandi dan penggunaan teknologi canggih oleh sindikat-sindikat kejahatan internasional. Hal tersebut, merupakan tantangan yang perlu ditangani secara intensif dengan melibatkan beberapa negara untuk menjalin pola hubungan dalam konstelasi global dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Dengan semakin berkembangnya ancaman kejahatan transnasional, maka negara di manapun di dunia tidak dapat bekerja sendiri dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, kerjasama antar negara harus lebih ditingkatkan dan di optimalkan

sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai, sebagaimana semboyan organisasi International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) yaitu *“Collectively fight for a safer world”* (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman).

Kerjasama penanggulangan ancaman keamanan *transnasional* antar negara sangat di butuhkan karena pelaku kejahatan *transnasional* akan selalu berupaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara, sedangkan di pihak lain penegak hukum khususnya kepolisian suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya.

### **Ancaman Terhadap Keamanan dan Kedaulatan Nasional Indonesia**

Karena letaknya yang strategis, Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Adapun beberapa ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional Indonesia, serta upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasinya antara lain perdagangan manusia, korupsi, peredaran narkotika dan obat terlarang, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, dan kejahatan transnasional.

Dalam hal perdagangan manusia, pemerintah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang termasuk dalam migrasi ireguler melalui kerja

sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Bagi Indonesia, isu terkait migrasi ireguler bersifat lintas negara harus diatasi bersama dengan meningkatkan kolaborasi antar negara karena tidak ada satu negarapun yang dapat menyelesaikannya sendiri. Indonesia berpandangan bahwa penyelesaian yang berkesinambungan dibutuhkan dalam penanggulangan akar permasalahan, seperti kemiskinan, kurangnya akses, ketidakadilan, kurangnya penegakan hak asasi manusia, kesenjangan pembangunan dan kurangnya pendidikan.

Dalam hal pemberantasan korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama Pemerintah RI yang dilaksanakan pada tingkat nasional maupun global. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Indonesia secara konsisten berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan posisi nasional di berbagai mekanisme di bawah UNCAC, serta G20. Selain itu, Indonesia juga aktif mendorong upaya pemulihan aset (*asset recovery*) guna memperoleh kembali aset-aset yang telah dilarikan oleh koruptor ke luar negeri. Dalam upaya pemulihan aset, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam konteks bilateral.

Sementara itu, dalam hal pemberantasan narkoba dan obat terlarang, kejahatan narkoba dan obat terlarang (narkoba) pada umumnya bersifat transnasional (*cross border*), sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas dari sasaran sindikat kejahatan narkoba internasional termasuk Indonesia.

Karena sifatnya yang lintas batas tersebut, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri. Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara *'supply and demand reduction'* dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan

narkoba sebagai *'shared responsibility'*. Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang telah diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi Indonesia yaitu pencurian Ikan (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*). Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja sama maritim melalui diplomasi serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna mengamankan sumber daya alam kelautan dan zona ekonomi eksklusif. Kerja sama penanggulangan IUU Fishing akan mendukung strategi Pemri dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, yaitu mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian IUU Fishing serta kegiatan lain yang merusak di laut. Di tataran multilateral, Indonesia secara konsisten berupaya mengarusutamakan jenis-jenis kejahatan di dalam IUU Fishing sebagai tindak pidana transnasional terorganisasi baru di berbagai forum.

Terakhir, permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu kejahatan transnasional (kejahatan lintas negara baru dan berkembang). Pada tahun 2010, Konferensi Para Pihak UNTOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (*New and Emerging Crimes*), antara lain *cybercrime, identity-related crimes*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dapat lebih ditingkatkan.

Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur secara lebih komprehensif mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pertukaran informasi dapat lebih diperkuat.

### **Intensifikasi Kerjasama Internasional**

Untuk itu, pemerintah diharapkan senantiasa mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman keamanan serta kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Adapun beberapa ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi mengganggu keamanan dan kedaulatan nasional Indonesia, serta upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasinya antara lain Perdagangan Manusia, Pemberantasan Korupsi, Pemberantasan Narkoba dan Obat terlarang, Pencurian Ikan (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*), Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang.

Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan *transnasional* melalui peningkatan kemampuan (*capacity building*) bersama para aparat penegak hukum, serta perlu dibuatnya suatu kesepakatan dan kesepahaman bersama guna menanggulangi kejahatan *transnasional* tersebut. Selain itu, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bahu membahu dan memberikan sumbangsih terbaiknya dalam upaya peningkatan kerjasama internasional untuk menanggulangi kejahatan *transnasional* sehingga kedaulatan dan keamanan nasional terjaga dan pembangunan nasional akan terwujud.



Prof. Dr. Njaju Jenny Malik Toni Hardjanto, Ketua FBI

# Ciptakan Intellectual Atmosphere Lewat 'Forum Berbagi Ilmu'

Oleh: Prof. Dr. Njaju Jenny Malik Toni Hardjanto

Ketua FBI

Sebagai lembaga yang memiliki misi "Memberikan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis" maka pada pertengahan Agustus 2017, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengamanatkan kepada Prof. Dr. Njaju Jenny Malik Tajar Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI untuk menjadi Ketua dalam Tim Kerja Kegiatan Forum Berbagi Ilmu.

Melalui diskusi dengan pimpinan Lemhannas RI, maka akan dibentuk Forum Berbagi Ilmu sebagai forum diskusi dan *academic sharing* bagi para jajaran intelektual di Lemhannas RI. Forum Berbagi Ilmu merupakan wadah bagi para Tajar, Taji dan Taprof untuk bertukar pikiran dan saling berbagi ilmu terhadap suatu topik atau permasalahan terkini di masyarakat (*current issue*) dari segala sudut pandang.

Untuk mengetahui rencana mengenai pengembangan Forum Berbagi Ilmu, redaksi Majalah Swantara mewawancarai Prof. Jenny untuk menggali lebih jauh mengenai gagasan forum tersebut.

## Sebetulnya apakah tujuan pembentukan FBI ini ?

Tujuan pembentukan FBI ini adalah untuk membangun kapasitas intelektual jajaran Lemhannas RI. Selama ini, Gubernur Lemhannas RI selalu menekankan kepada pegawai dan tenaga ahli untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing, dan tentu saja mereka memiliki pemahaman atas sebuah permasalahan dari perspektif masing-masing. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak dari kami para tenaga ahli yang belum pernah berada dalam satu meja, hal ini menyebabkan kami para tenaga ahli belum dapat melihat permasalahan dari berbagai sisi.

## Kenapa harus dinamakan 'Berbagi', apakah selama ini belum dibagi?

Dalam kenyataannya belum, dalam artian kita belum pernah berkumpul bersama untuk membicarakan sesuatu. Sebagai contoh saya tajar di bidang sosial budaya, tetapi saya tidak pernah tahu perkembangan di bidang ekonomi jika saya tidak mendatangi kepada yang ahli di bidangnya. Tapi kalau di forum

ini akan ditampilkan permasalahan tersebut, sehingga semua orang bisa dengar dan menjadi tahu, disinilah yang di maksud berbagi berbagi. Selain itu 'berbagi' tampaknya terkesan tidak menakutkan dan tidak memaksa orang. Artinya disini adalah *academic sharing*, atau *knowledge sharing*. Karena gubernur ingin menciptakan *academic atmosphere* di lingkungan Lemhannas.

## Topik apa sajakah yang akan dikupas dalam forum ini?

Forum Berbagi Ilmu (FBI) akan mengangkat isu aktual (*current issues*) saat ini, yakni masalah yang sedang booming di masyarakat. Misalnya, 2018 ini adalah tahun politik, Lemhannas dapat melihat bagaimana perkembangan politik di tahun 2018, apakah dari segi etika politiknya, budaya politik, atau segi politik praktis. Misalnya saja, Lemhannas RI melalui FBI mengaitkan antara politik dengan maraknya penyebaran hoax, dan tentu saja memberikan masukan terkait bagaimana masyarakat dapat menanggapi tahun politik di dalam era sekarang.



Prof. Jenny pada saat peluncuran Kamus besar Rusia-Indonesia di Ruang Dwiwarna Lemhannas RI

Sumber : id.rbth.com

***Kenapa perlu mengangkat current issues sebagai topik dalam FBI?***

Mengangkat current issues yang terjadi di masyarakat sangat penting, hal ini juga sejalan dengan penekanan gubernur bahwa Lemhannas harus bisa menanggapi permasalahan yang ada. Dengan mengangkat dan mengkaji *current issues*, Lemhannas RI sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada presiden dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Misalnya saja trend berkembangnya *hoax* saat ini, tentu saja menarik bila dilihat dari berbagai sisi. Kalau dari perspektif humaniora misalnya, ada sebuah buku berjudul 'Post Truth', jika saat ini mudah sekali tersebar *hoax* melalui berbagai media. Itulah era 'Post Truth', artinya bahwa fakta yang ada hanya dilihat dari sudut pandang orang yang melihat saja, sesuai dengan kepentingan pribadi orang tersebut. Jadi kita sudah tidak berbicara fakta lagi, oleh karena itu disebut 'Post Truth' atau sesudah kebenaran.

***Siapa yang akan menjadi pembicara dalam FBI nantinya?***

Pada awalnya bersama gubernur, kami merencanakan untuk menghadirkan audiens setingkat eselon II ke atas karena nantinya para direktur tersebut akan diproyeksikan menjadi Tajar, Taji, dan Taprof. Akan tetapi, gubernur berharap agar forum tersebut dapat melibatkan para pegawai setingkat dengan kolonel/pejabat eselon III. Untuk pembicara

sendiri, FBI akan mengundang pakar dari dalam dan luar Lemhannas. Pemateri dari luar lembaga dihadirkan untuk menjadi penyeimbang antara pandangan pembicara Lemhannas dengan aspirasi yang berkembang di luar secara umum.

***Jika nantinya FBI ini sudah berjalan, output apa yang diharapkan?***

Output yang dihasilkan akan dibuat semacam *policy paper*. Kami rencanakan akan diberikan kepada RI 1 ataupun untuk para pemangku kepentingan, karena pembahasannya sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian jika sudah terkumpul selama satu tahun, *policy paper* tersebut dapat dihimpun menjadi sebuah buku yang kemudian dapat disebarluaskan ke masyarakat. Akan tetapi ini semua belum diputuskan, untuk itu kami sebagai tim akan berdiskusi dengan gubernur dan wagub untuk menentukan bagaimana output yang akan dihasilkan kemudian.

***Prof. Jenny telah berpengalaman dalam mengikuti forum-forum serupa diluar Lemhannas. Lalu hal apa yang sekiranya perlu dicontoh oleh FBI dari forum sejenis di luar?***

Hal perlu ditiru dari forum serupa yakni bagaimana kita dapat mengupas suatu masalah aktual dari berbagai sudut pandang. Jika Lemhannas RI mempunyai format untuk melihat permasalahan secara holistik, komprehensif, dan integral, maka dalam koridor tersebutlah kita perlu menjalankan. Forum perlu melihat

permasalahan dari seluruh aspek Asta Gatra.

***Apa harapan Anda dari FBI?***

Saya berharap Lemhannas RI yang memiliki fungsi memberikan masukan kebijakan kepada presiden, dapat semakin berkembang kapasitasnya, serta cara berpikir yang semakin meningkat. Bukan berarti selama ini SDM Lemhannas rendah, justru sebaliknya Lemhannas ini diisi oleh orang-orang yang berkompeten di masing-masing bidang. Oleh karena itu, di sini dibuat forum sebagai wadah bagi siapa saja untuk saling berbagi ilmu, sehingga dengan sendirinya juga akan berdampak pada peningkatan fungsi lembaga.

“

*Kita harus mampu berpikir secara holistik, komprehensif, dan integral, maka disinilah kita jalankan*

- Ketua FBI Prof. Dr. Njaju Jenny Malik

- Agus Widjojo Berikan Ceramah Singkat di Hadapan 50 Orang Anggota KBFP Angkatan 7



Sekolah Pemimpin Muda Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) angkatan 7 menerima pembekalan seputar isu ketahanan nasional oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Kamis (8/1) di Ruang Airlangga Gd. Astagatra Lemhannas RI. Sebanyak 50 orang peserta yang hadir merupakan pemuda terbaik dari berbagai *background* profesi serta pendidikan se-Indonesia.

- Seluruh Pegawai Lemhannas RI ikuti Jam Pimpinan



Lemhannas RI kembali menggelar Jam Pimpinan dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Senin (8/1). Jam Pimpinan kali ini digelar sebagai salah satu kegiatan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Lemhannas RI di tahun 2017 beserta kendala yang dihadapi.

## • Pembukaan Kuliah Matrikulasi L-IUN



Mahasiswa Program Magister Ketahanan Nasional (tannas) yang menerima beasiswa S2 Lemhannas-Inter University Network (L-IUN) mengikuti kegiatan kuliah matrikulasi selama 12 hari, mulai tanggal 8 – 19 Januari 2018. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. di Ruang Arjuna, Gd. Astagatra Lantai III Lemhannas RI.

## • Rapat Manajemen Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan



Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum., Tajar Bidang Hankam Lemhannas RI memberikan paparan terkait Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan dihadapan seluruh jajaran pimpinan Lemhannas RI dalam rapat manajemen, Selasa (10/1) di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI. Rapat manajemen tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, beserta Wagub dan Sestama. Agus Widjojo menyampaikan agar mampu memanfaatkan kegiatan ini untuk bertukar pikiran terutama terkait perencanaan anggaran dan keuangan

## • Agus Widjojo Pimpin Serah Terima Jabatan



Selasa (16/1), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memimpin Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab), Pelantikan, serta Pengangkatan Sumpah Janji Pejabat Lemhannas di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lemhannas RI. Agus Widjojo menyampaikan dalam sambutannya, Sertijab ini merupakan bagian dari regenerasi dalam penyegaran dan pembinaan karir personil untuk membawa pengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

## • Pre Course Peserta PPRA Mancanegara



Calon peserta PPRA LVII dan LVIII tahun ajaran 2018 Mancanegara menerima pembekalan awal tentang pengenalan kelembagaan oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto, Rabu (7/2) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra, Lemhannas RI. Peserta terdiri dari 13 orang yang berasal dari 11 negara, yakni Australia, Bangladesh, Fiji, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura, Sri Lanka, Timor Leste, dan Zimbabwe.



## • Perista Manfaatkan Limbah Kain Perca sebagai Peluang Bisnis



Persatuan Istri-Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI menggelar pertemuan rutin yang sekaligus dalam rangka memperkenalkan para anggota baru yang suaminya baru saja dilantik sebagai pejabat Lemhannas, (16/1) Siang di ruang Dwi Warna Purna, Gd. Pancagatra Lemhannas RI. Dalam kegiatan tersebut, menghadirkan seorang ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan limbah kain perca untuk dibuat frame cermin. Para peserta yang hadir diajarkan keterampilan tersebut yang nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

## • Lemhannas RI Jalin Kerjasama dengan RSIS



Dalam rangka mempererat kerja sama antara Lemhannas dengan Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSIS), Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima *courtesy call* dari Associate Professor dan Koordinator Program Indonesia Leonard C. Sebastian, Jumat (23/2) di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI. Leonard bermaksud mengundang Agus Widjojo untuk bersedia hadir sebagai pembicara dalam sebuah seminar yang diadakan oleh RSIS.

- Pengkajian Gelar FGD Bahas Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik



Kedeputian Bidang Pengkajian Strategik menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema besar “Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik guna Mengurangi Implikasinya dalam Rangka Ketahanan Nasional”, (14/2) dengan menghadirkan empat orang narasumber Direktur B BAIS TNI Brigjen TNI Saptono Adji, Fungsional Diplomat Utama Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kemenlu RI Dr. Ben Perkasa Drajat, Tokoh Militer dan Politisi Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo, Direktur Eksekutif The Global Future Institute Hendrajit.

- Panitia Dies Natalis HMPI Audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI menerima Audiensi Dies Natalis dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) yang ke 19 tahun, Senin (26/2) di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI. HMPI merupakan wadah yang menghimpun seluruh organisasi kemahasiswaan program pascasarjana di tingkat perguruan tinggi se-Indonesia.

- Fungsi Parpol Jadi Tema FGD Pengkajian Jelang Pemilu 2018-2019



Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengadakan suatu kajian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap fungsi partai politik, menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres tahun 2018-2019 mendatang, Selasa (6/3) di Ruang Gatot Kaca, Gd. Astagatra, Lemhannas RI. Mengangkat tema besar “Aktualisasi kepemimpinan negarawan di lingkungan kader partai politik guna terwujudnya etika politik dalam rangka ketahanan nasional”.

- KADIN Konsisten Jalin Kerja Sama dengan Lemhannas RI



Baru-baru ini KADIN melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk meningkatkan kerjasama di antara kedua institusi ini, pada Selasa (13/3) di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lemhannas RI. KADIN setiap tahunnya mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Taplai) dan hingga saat ini sudah ada empat angkatan KADIN yang mengikuti Taplai.

## • Gubernur Lemhannas RI hadiri Pembukaan Training of Trainers di Palembang



Kegiatan *Training of Trainers* Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Para Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Sumatra Selatan dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Selasa (6/2), di Hotel Novotel Palembang. Kegiatan ini merupakan model pelatihan dalam rangka menciptakan pengajar-pengajar berwawasan kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi, memiliki pemahaman yang kuat dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan untuk ditularkan kepada peserta didiknya.

## • Berbagai Kalangan di Ternate Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan



Sebanyak 100 peserta dari kalangan birokrat, akademisi, DPRD, tokoh masyarakat, dan elemen TNI-Polri dari Ternate, Provinsi Maluku Utara mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Acara yang bertajuk “Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri di Ternate” ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara pada Selasa (20/03).

- Agus Widjojo sebagai narasumber dalam Talkshow TVRI Sumatera Selatan



TVRI Sumatera Selatan mengundang Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo beserta Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. dengan mengangkat topik Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan.

Agus Widjojo ketika ditanya mengenai tantangan dinamika yang sedang dihadapi oleh Indonesia menurutnya bangsa ini sedang mengalami tiga transisi sekaligus yakni transisi politik, transisi lintas generasi, dan transisi teknologi informasi.

- Gubernur Lemhannas RI hadiri Wawancara di TVRI Ternate



Bersama dengan Sultan Tidore ke-37, Husain Syah dan (Plt) Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam Talkshow yang digelar oleh TVRI Ternate, (19/3). Dalam Talkshow tersebut Agus Widjojo berbicara mengenai nilai-nilai dan wawasan kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar kebangsaan.

# TAHAPAN PILKADA SERENTAK 2018

Juni 2018, 171 wilayah di Indonesia akan kembali menggelar Pilkada Serentak 2018. Berikut jadwal tahapan yang akan dilalui.

## SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN

**22 - 26 NOVEMBER 2017**

Penyerahan syarat dukungan paslon **gubernur** dan **wakil gubernur** ke KPU Provinsi

**25 - 29 NOVEMBER 2017**

Penyerahan syarat dukungan paslon **bupati - wakil bupati** atau **wali kota - wakil wali kota** ke KPU/KIP Kabupaten/Kota

**9 - 11 DESEMBER 2017**

Penyampaian syarat dukungan paslon **gubernur** dan **wakil gubernur**, **bupati** dan **wakil bupati**, **wali kota** dan **wakil wali kota** kepada PPS

## PENDAFTARAN PASANGAN CALON

**8 - 10 JANUARI 2018**

Pendaftaran pasangan calon

**12 FEBRUARI 2018**

Penetapan pasangan calon

**13 FEBRUARI 2018**

Pengundian nomor urut

## MASA KAMPANYE

**15 Februari - 23 Juni 2018**

Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye.

**15 Februari - 23 Juni 2018**

Debat publik terbuka.

**10 - 23 Juni 2018**

Kampanye melalui media massa.

**24-26 Juni 2018**

Masa tenang dan pembersihan alat peraga.



## TAHAPAN PILKADA 2018 KPU NOMOR 1 TAHUN 2017 PASAL 1

### Tahapan Persiapan

- Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NP)
- Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih

### Tahapan Penyelenggara

- Penyerahan syarat dukungan paslon perseorangan
- Pendaftaran Paslon
- Pemeriksaan kesehatan paslon
- Perbaikan syarat pencalonan Penetapan paslon
- Pengundian dan penetapan nomer urut paslon



018  
SAL 4



an

## Masa Kampanye



## LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

1

4 FEBRUARI 2018

Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

2

20 APRIL 2018

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

3

24 JUNI 2018

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

4

11 - 13 JULI 2018

Pengumuman hasil audit dana kampanye

## PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN



27 JUNI 2018

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS



4 - 6 JULI 2018

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk pilkada kabupaten/kota



7 - 9 JULI 2018

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pilgub

## SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN



**MAHKAMAH KONSTITUSI**

Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi



**PENETAPAN**

Penetapan paslon terpilih pasca putusan MK paling lama 3 hari setelah putusan MK dibacakan

design

kumparan

INFOGRAFIS: ANDINA D. UTARI

OLAH DATA: RINA NURJANAH

SUMBER: KPU.GO.ID

